

KOMPETEN

(Kanal Informasi dan Media Publikasi Talenta Perdagangan)

TRANSFORMASI Tata kelola JF Perdagangan

Liputan utama dengan Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur KemenPAN & RB & Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara (BKN)



2 SALAM REDAKSI

3 LIPUTAN UTAMA



Kebijakan transformasi tata kelola jabatan fungsional bidang perdagangan

33 MOHAMAD NURDINSYAH

Metrologi dalam Teknologi: Kecil, Pintar, Tukang Ukur (*Smartwach*) Bagian 2

35 ADI CANDRA PURNAMA

Sebuah Catatan tentang Jabatan Fungsional di Era PermenPAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023

40 MEGA INDRASWARI

Peran Perpustakaan dalam peningkatan wawasan dan Pengetahuan Semua Pejabat Fungsional

43 ANDHI

Potensi BRICS dalam Pelemahan Dolar Amerika Serikat

46 IDA BAGUS KETUT

Pelaku Usaha IKM/UKM di Kabupaten Gianyar dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan melalui Ekspor dan Impor

48 Infografis Menenal Binbot

ARTIKEL

8 INDRA WIJAYANTO

Program Minyak Goreng Rakyat: Upaya Pemerintah Menjaga Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga Minyak

11 HIDAYATI RATNANINGSIH

Peluang Pasar Ekspor Produk Kerajinan Bambu Indonesia di Inggris

15 INDRA SATRIA SIBURIAN

Peluang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Sektor Peternakan Dalam Produksi UMKM

17 FITRIA FARADILA

Tingginya Porsi Impor Bahan Baku pada Industri Makanan dan Minuman

20 J. HENDRA HUMBERTO

PeMbungkus: Agar Kemasan Sesuai Ketentuan

24 ROMADHONI ANTO

Mengenal lebih dekat Kopi Instan

27 PENNY CHARITI

Masyarakat Sebagai *Watchdog* Metrologi

29 BAIQ DEWI AYU

Yuk, Waspada! Kecurangan Transaksi Jual Beli di Pasar!

31 RACHMAT ADIWIBOWO

Gotong Royong, Kerjasama Antar Anggota dan Kreativitas Pengurus Kunci Sukses Menjadikan Koperasi Maju dan Bermanfaat



TIM REDAKSI

Penanggung Jawab

Sri Iryanti

Redaktur

Permadi

Penyunting

Claudia Frederika M.

Eko Karsono

Febri Surya Pranata

Desain Grafis

Mega Indraswari

Maulana Holiq Yanuar

Sekretariat:

Yul Meilani

Alamat Sekretariat Redaksi

Kantor Pusat

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta 10110

Tel. 021-23528400 Ext. 32907

Kantor Bandung

Jl. Daeng Muhammad Ardiwinata

km 3,4 Cihanjuang, Parongpong

Bandung Barat 40559

Tel. 022-6611054, 022-6610863 Fax. 022-6611053

“Hidup adalah tantangan, jangan dengarkan omongan orang yang tidak jelas, yang penting kerja, kerja dan kerja. Kerja akan menghasilkan sesuatu, sementara omongan hanya menghasilkan alasan.”

-Presiden RI Joko Widodo-

Halo Aparatur Perdagangan,

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa sehingga Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan, Kementerian Perdagangan dapat menerbitkan Majalah KOMPETEN edisi kedua ini sebagai media komunikasi untuk para sobat SDM Fungsional bidang Perdagangan.

Sebagaimana namanya, Majalah KOMPETEN diharapkan dapat menjadi kanal informasi dan pengetahuan serta pengalaman di bidang Fungsional Perdagangan untuk para Sobat SDM Fungsional bidang Perdagangan, pelaku usaha dan masyarakat luas. Majalah ini merupakan hasil tulisan para Sobat SDM Fungsional Perdagangan dari seluruh Indonesia yang penuh semangat untuk menyampaikan tema seputar pengetahuan dan informasi terkait kegiatan di bidang Fungsional Perdagangan, yang ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami.

Kami dari tim redaksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut berpartisipasi untuk terbitnya majalah ini. Kami berharap agar majalah KOMPETEN ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dalam menambah wawasan serta memberikan kontribusi yang berarti terhadap kegiatan Fungsional bidang Perdagangan di Indonesia. Kami tentunya menyadari bahwa dalam penulisan majalah ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mohon maaf atas kekurangan yang ada dan selalu menerima masukan, kritik dan saran dari pembaca sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Akhir kata selamat membaca, tetap semangat berkarya untuk kita semua.

Salam hangat,

Tim Redaksi.

Kebijakan Transformasi Tata Kelola Jabatan Fungsional bidang Perdagangan

Oleh: Adi Candra Purnama, Kepala Bagian Tata Usaha
Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan



“

PermenPAN & RB 1/2023, menerapkan konteks *talent mobility*, dimana saat ini pejabat fungsional diberi kebebasan untuk menentukan pilihan pola karirnya, baik secara vertikal, horizontal dan diagonal

-Haryomo Dwi Putranto-

Dengan terbitnya PermenPAN & RB 1/2023 ini, tentu akan mempengaruhi arah kebijakan yang mengatur terkait jabatan fungsional, menurut Pak Aba, penetapan PermenPANRB ini dilatarbelakangi keinginan untuk melakukan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka menindaklanjuti Mandat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai satu profesi dan madatori Bapak Presiden kita terkait penyederhanaan birokrasi sehingga organisasi pemerintah menjadi lebih agile dan dinamis. Hal ini tentu saja akan memperkuat posisi ASN yang saat ini sekitar 60% diduduki oleh pejabat fungsional, sehingga diharapkan para pemangku jabatan fungsional ini bisa berkinerja dengan lebih agile, fleksibel dan fokus berkontribusi terhadap capaian kinerja organisasi. Walaupun tujuan akhirnya adalah peningkatan kinerja organisasi, kebijakan PermenPAN & RB 1/2023 ini juga membuka peluang untuk pengembangan karier dan berekspresinya para pejabat fungsional karena predikat kinerja yang dikonversi menjadi

Pada tanggal 6 Januari 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional (PermenPAN & RB 1/2023), menindaklanjuti perubahan ketentuan terkait jabatan fungsional ini, Tim majalah KOMPETEN berkesempatan melakukan wawancara yang mengusung tema "Transformasi Tata Kelola Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan" dengan Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaaan Sumber Daya Manusia Aparatur (Asdep P3) KemenPAN & RB, Bapak Aba Subagja, S.Sos., M.A.P. dan Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bapak Drs. Haryomo Dwi Putranto, M.Hum.



“

Kompetensi ASN tidak dibatasi oleh satu kualifikasi walaupun sebenarnya juga menguasai kualifikasi lainnya, hal ini yang ingin diakomodir PermenPANRB 1/2023 dengan menggantikan butir-butir kegiatan jabatan fungsional menjadi ruang lingkup jabatan

”

-Aba Subagja-

menguasai kualifikasi lainnya, hal ini yang ingin di a k o m o d i r PermenPANRB 1/2023 dengan menggantikan butir-butir kegiatan jabatan fungsional menjadi ruang lingkup jabatan. Dari sisi kepastian karir, Pak H a r y o m o j u g a menyampaikan bahwa dengan ketentuan PermenPAN & RB 1/2023, maka perhitungan angka kredit yang dulu menggunakan butir-butir kegiatan dikonversi menjadi angka kredit dari hasil penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini bisa m e n g a c u p a d a PermenPAN & RB 6/2022, dimana diawali dengan adanya dialog kerja antara atasan dengan bawahan sebagai dasar pembuatan kontrak kerja untuk satu tahun kedepan, dan bukan hanya sekedar menilai tapi bagaimana meningkatkan kinerja dari bawahannya (pejabat fungsional)

angka kredit sebagai dasar mendapatkan kenaikan pangkat/jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.

Sependapat dengan Pak Aba, menurut Pak Haryomo arah pengembangan karier jabatan fungsional saat ini lebih mudah dan luas cakupannya dan merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat peningkatan karier para pejabat fungsional, karena PermenPAN & RB 1/2023 ini menerapkan konteks *talent mobility*, dimana saat ini pejabat fungsional diberi kebebasan untuk menentukan pilihan pola karirnya, baik secara vertikal, horizontal dan diagonal. Pak Haryomo juga menyinggung terkait pengangkatan kedalam jabatan fungsional (CPNS) melalui jalur pengangkatan pertama, yang saat ini lebih mudah dan fleksibel. Sehingga untuk diangkat dalam jabatan fungsional, dapat langsung dilakukan setelah diangkat menjadi PNS tanpa harus mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) atau uji kompetensi lagi, dengan catatan pejabat tersebut setelah diangkat diberikan maksimal waktu 3 (tiga) tahun untuk dapat mengikuti diklat pembentukan Jabatan Fungsionalnya. Kebijakan transformasi jabatan fungsional ini diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik, baik dari sisi pola karirnya, pengembangan kompetensi yang dimiliki sampai kompensasi tunjangan jabatan yang bisa diterima.

Berkenaan dengan perubahan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang akan digantikan dengan ruang lingkup secara implementatif, Pak Aba menjelaskan bahwa butir-butir kegiatan yang dulu seolah-olah mengunci gerak langkah jabatan fungsional sehingga tugasnya telah terdefiniskan melalui butir-butir kegiatan, sementara tuntutan organisasinya sudah berbeda dan sekarang kompetensi ASN tidak dibatasi oleh satu kualifikasi walaupun sebenarnya juga



dimana hasil penilaian kinerja ini dikonversikan menjadi angka kredit sebagai dasar mendapatkan kenaikan pangkat atau jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Kepastian karier ini dibuat penjenjangan, dimana jabatan fungsional memiliki 2 kategori jenjang jabatan, dimana masing-masing kategori memiliki 4 (empat) jenjang jabatan, dan masing-masing jenjang jabatan harus ada level kompetensi dan tingkat kesulitannya, level kompetensi ini harus berbeda diantara jenjang jabatan supaya para pemangku jabatan fungsional ini merasa bangga. Dalam hal penilaian kinerjanya ada tim penilai kinerja sebagai pengganti tim penilai angka kredit yang ada saat ini, yang bertugas untuk memagari agar atasan lebih objektif dalam melakukan penilaian sehingga tidak menilai berdasarkan asumsi dan persepsi saja namun sudah ada alat ukurnya. Diharapkan dengan penjenjangan ini maka para pejabat fungsional mendapatkan penugasan sesuai dengan jenjang jabatan pada level kompetensinya, disitulah fleksibilitas jabatan sebagai pilihan karirnya.

“
**Instansi Pembina
 perlu melakukan
 simplifikasi jabatan
 fungsional bidang
 perdagangan yang
 sudah ada saat ini.**

”
 -Aba Subagja-

Penetapan PermenPAN 1 tahun 2023 ini juga membawa perubahan pada 286 jabatan fungsional yang ada saat ini. Menurut Pak Aba, Instansi Pembina dalam hal ini Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan (Pusbin JF Perdagangan) perlu melakukan simplifikasi jabatan fungsional bidang perdagangan yang sudah ada saat ini. Dalam melakukan simplifikasi jabatan harus melihat ruang lingkup jabatan tersebut karena ada jabatan fungsional bisa di simplifikasi dan konsolidasikan ada juga yang tidak. Langkah penting untuk melakukan simplifikasi dan konsolidasi adalah mulai dari pemetaan tugas dan fungsi, kemudian diturunkan ke jabatan fungsional dimana untuk Kementerian Perdagangan terdapat 11 (sebelas) jabatan fungsional, selanjutnya dikelompokkan kedalam tugas, fungsi dan rumpun jabatan baru kemudian diputuskan mana jabatan yang akan diintegrasikan dan konsolidasikan. Dalam mensimplifikasi jabatan fungsional yang ada, jangan sampai menghilangkan



“

Jabatan pelaksana tetap ada untuk membantu tugas dan fungsi organisasi. Walaupun demikian, jabatan pelaksana tidak mempunyai pola karir, hanya jabatan fungsional yang menjamin adanya kepastian karir.

”

-Haryomo Dwi Putranto-

kewenangan, mengurangi tugas dan fungsi, dan melemahkan orang untuk berkinerja. Hal senada disampaikan juga oleh Pak Haryomo dimana dengan adanya simplifikasi jabatan fungsional ini, para pejabat fungsional dalam membuat kontrak kerja sudah tidak melebar kemana-mana, dimana ruang lingkup adalah pengganti dari butir-butir kegiatan bagi pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas setahun kedepan. Dengan mengurangi jumlah jabatan fungsional (simplifikasi jabatan), tidak untuk membatasi ruang lingkup pekerjaannya namun ruang lingkup pekerjaan dapat menjadi lebih luas, sehingga para pejabat fungsional ini bisa mobile kemana-mana, mengerjakan lingkup jabatan fungsional lain yang serumpun dengan jabatan fungsional yang diemban. Diharapkan dengan simplifikasi jabatan fungsional ini diharapkan dapat menguatkan, berdinamika, walaupun menjadi lebih sederhana namun pejabat

fungsional dapat berkinerja lebih tinggi dari yang sebelumnya.

Sedangkan bagi jabatan pelaksana, Pak Haryomo juga menjelaskan bahwa saat ini PermenPAN & RB 41/2018 tentang jabatan pelaksana sudah dicabut dan diganti dengan PermenPAN 45/2022 yang membagi jabatan pelaksana menjadi 3 klasifikasi jabatan yaitu klerek, operator, dan teknisi. Dengan PermenPAN 45/2022 ini menunjukkan bahwa jabatan pelaksana tetap ada untuk membantu tugas dan fungsi organisasi. Walaupun demikian, jabatan pelaksana tidak mempunyai pola karir, hanya jabatan fungsional yang menjamin adanya kepastian karir. Menanggapi hal ini, Pak Aba menjelaskan bahwa pola karir jabatan fungsional dapat melalui mekanisme

“

Diharapkan dengan *talent pool* kita akan mendapatkan orang-orang yang terbaik sepanjang prosesnya obyektif dan tidak ada intervensi politik.

”

-Haryomo Dwi Putranto-

promosi atau perpindahan dari jabatan lain, namun harus tetap memperhitungkan kinerja dan potensi serta kapasitas orang apakah mumpuni untuk dapat menduduki jabatan fungsional yang dituju atau tidak.

Menurut Pak Aba, karena *mandatory* tugas dan fungsi jabatan fungsional itu dari instansi Pembina, maka instansi pembina berperan dalam menetapkan ruang lingkup jabatan fungsional, kemudian apa yang menjadi dasar untuk bisa menduduki jabatan fungsional tersebut, serta menentukan kualifikasi, kompetensi dan tugas pengalaman sesuai persyaratan. Fokus utama dari Instansi Pembina adalah kualitas jabatan fungsionalnya. Jadi kalau yang bersangkutan tidak kompeten disitu kalau perlu diberhentikan dan dipindahkan ke jabatan fungsional lain, supaya kinerja organisasi bisa berjalan dan tercapai dengan baik. karena tujuan kita melakukan penataan jabatan fungsional supaya kinerja para pemangku jabatan fungsional ini menjadi peningkatan karir dan pengembangan kompetensi yang bersangkutan, yang kemudian akan berdampak pada kinerja organisasi. Hal ini sejalan dengan yang

disampaikan oleh Pak Haryomo, bahwa untuk dapat menduduki suatu jabatan fungsional perlu dilakukan uji kompetensi (ukom) untuk melihat kompetensi pejabat fungsional tersebut sebelum menduduki suatu jenjang jabatan maupun ketika akan berpindah ke dalam jabatan fungsional lain. Mungkin kedepannya tidak menutup kemungkinan tidak diperlukan ukom lagi namun bisa dengan cara/metode lain untuk mengukur level kompetensi setiap pejabat fungsional. Namun saat ini, masih diperlukan ukom untuk mengukur level kompetensi dan sebagai dasar rekomendasi level kompeten yang bersangkutan untuk dapat menduduki jabatan atau mendapatkan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi (pola karier).

Secara umum telah diketahui bahwa ASN itu ada dua kelompok yaitu PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), saat ini P3K tengah menjadi sorotan karena animonya peminatnya cukup banyak. Terkait hal tersebut Pak Aba menjelaskan bahwa per tanggal 28 November 2023 nanti tidak ada lagi status non ASN (honorar), harapannya semua jadi ASN, status non ASN yang masih ada saat ini wajib diisi oleh ASN bisa dari P3K, hal ini diatur dalam Keputusan MenPAN & RB 158/2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan MenPAN & RB 1197/2021 Tentang Jabatan Fungsional yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Hal ini juga merupakan tugas dari Instansi Pembina untuk menentukan mekanisme, persyaratan agar kompetensi dari pegawai yang akan menduduki jabatan fungsional dari jalur P3K agar mumpuni.

Sebagai penutup, Pak Haryomo juga menyampaikan bahwa di dalam undang- Undang Aparatur Sipil Negara telah diatur mengenai pengangkatan Jabatan Pratama Tinggi (JPT) yang harusnya sudah menggunakan *talent pool*, namun masih banyak Instansi yang masih menggunakan sistem *bidding*. Sistem *bidding* ini hanya untuk sementara apabila Instansi belum membangun *Talent Management/Manajemen Talenta*. Diharapkan dengan *talent pool* kita akan mendapatkan orang-orang yang terbaik sepanjang prosesnya obyektif dan tidak ada intervensi politik.



Sumber foto: freepik.com

Program Minyak Goreng Rakyat: Upaya Pemerintah Menjaga Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga Minyak Goreng

Oleh: Indra Wijayanto, Analis Perdagangan Ahli Madya
Bapakting, Kementerian Perdagangan



Sumber foto: freepik.com

Komoditi Minyak Goreng sempat menjadi perbincangan hangat di dalam negeri pada akhir tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022. Hal ini tidak terlepas dari adanya gejolak kenaikan harga yang terjadi di hampir seluruh penjuru negeri. Selain harga yang melonjak, terdapat persoalan pasokan yang juga berkurang secara tiba-tiba, sehingga membuat masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng kemasan, baik di pasar tradisional maupun ritel modern. Pemerintah pun tidak luput dari berbagai keluhan dari masyarakat yang meminta agar segera menormalisasi kondisi pasar penjualan minyak goreng.

Konon, kenaikan harga minyak goreng yang dipicu oleh kenaikan harga *crude palm oil* (CPO) dunia yang merupakan bahan baku minyak goreng. Kenaikan harga minyak goreng juga direspon oleh Pak Jokowi melalui kanal YouTube Sekretariat Kabinet yang menugaskan kementerian Perdagangan untuk melakukan upaya agar masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau.

Secara *sequence*, telah terbit 14 Permendag untuk pengaturan minyak

goreng dari bulan Januari 2021 sd Juni 2022 dan 6 Peraturan Menteri Perindustrian dan beberapa Peraturan Menteri Keuangan.

Kebijakan pertama adalah Permendag No. 1 tahun 2022 yang mengatur penyediaan minyak goreng kemasan sederhana dengan skema penggantian BPDPKS, Permendag No 2 tahun 2022, Permendag No 3 tahun 2022, Permendag No 6 tahun 2022 dan seterusnya. Pada akhirnya Permendag yang masih berlaku saat ini adalah Permendag No 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

Kebijakan di dalam Permendag 49 secara umum mengatur penyediaan minyak goreng rakyat dengan skema *Domestic Market Obligation* (DMO) yang diikuti oleh *Domestic Price Obligation* (DPO).

Filosofi kebijakan DMO adalah *diperuntukan untuk Produsen/Eksportir yang akan melakukan ekspor komoditi CPO dan 12 kode HS turunan CPO, wajib mendistribusikan minyak goreng dalam bentuk curah atau kemasan dengan merek MINYAKITA di dalam negeri dengan jumlah 300.000 ton per bulan.*

Banyak masyarakat dan media yang salah persepsi dengan mengatakan Minyak Goreng Rakyat

adalah minyak goreng subsidi. Hal tersebut adalah tidak tepat karena minyak goreng rakyat adalah hasil pengorbanan para Produsen/Eksporir minyak goreng untuk mendistribusikan minyak goreng didalam negeri dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp.14.000 per liter atau Rp.15.500 per kg.

Pengorbanan Produsen/Eksporir diapresiasi oleh Pemerintah dengan memberikan kompensasi insentif Hak Ekspor (HE) apabila minyak goreng DMO telah sampai kepada Distributor Pertama (D1). Insentif Hak ekspor dalam bentuk rasio pengali ekspor yang saat ini nilainya 1:6, yang dapat diartikan apabila produsen mendistribusikan minyak goreng rakyat di dalam negeri dengan volume 1000 ton, maka HE nya menjadi 6000 ton dan Produsen/Eksporir dapat mengajukan Persetujuan Ekspor (PE) sebagai syarat dokumen ekspor sebesar 6000 Ton

Sejak dimulainya program minyak goreng DMO pada bulan Juni 2022 telah terjadi beberapa perubahan rasio faktor pengali yang ditetapkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri, yang awalnya 1:5, berubah menjadi 1:7. Perubahan ke tiga menjadi 1:9 turun menjadi 1:8 dan terakhir faktor pengali 1:6 mulai berlaku 1 Januari sd sekarang. Penetapan faktor pengali merupakan amanat dari Permendag No 50 tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor CPO, RBDPO, RBDPL dan UCO yang dituangkan dalam Peraturan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri.

Pendistribusian minyak goreng di Indonesia sebagai Negara Kepulauan juga menjadi masalah, dengan bentangan dari Sabang sampai Merauke dan fakta lapangan lokasi produsen minyak goreng terbanyak di pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Kondisi ini menjadi faktor keengganan dari Produsen/Eksporir untuk mendistribusikan minyak goreng rakyat DMO ke wilayah Indonesia Timur. Selain itu pendistribusian dalam bentuk minyak curah bukan hal yang mudah jika dibandingkan dengan mendistribusikan minyak goreng kemasan.

Menjawab problema klasik diatas, dalam mengoptimalkan untuk pendistribusian minyak goreng rakyat di wilayah yang jauh dari pusat produksi, Pemerintah menstimulasi dengan menambah insentif faktor pengali kemasan apabila produsen/eksportir mengemas minyak goreng rakyat dengan Merek MINYAKITA dan penambahan insentif faktor pengali regional jika mendistribusikan ke wilayah tertentu yang tercantum di dalam Kepmendag No 1530 tentang Penetapan Faktor Pengali Kemasan dan Faktor Pengali Regional dalam Rangka Pemenuhan DMO Minyak Goreng.

Saat ini insentif faktor pengali sebesar 1,5 untuk kemasan bantal (pillow pack) dan insentif factor pengali kemasan sebesar 1,75 untuk kemasan *standing pouch*, botol dan jerigen. Sedangkan untuk faktor pengali

regional sebesar 1,3 untuk wilayah Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Faktor pengali regional 1,5 untuk wilayah Kalimantan Utara dan Faktor Pengali Regional 1,65 untuk wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan. Dengan tambahan pengali kemasan dan regional, dengan hanya DMO 1000 ton minyak goreng, maka HE produsen/Eksporir menjadi 17.325 ton apabila mengemas dengan kemasan botol dan kirim ke Papua.

Dari target DMO Minyak goreng dari Juni 2022 sd Januari 2023 sebesar 300.000 ton, secara rata-rata perbulan tercapai 289.268 ton atau 96,4%. Sedangkan pada Februari Pak Mendag memerintahkan untuk menaikkan target DMO minyak goreng menjadi 450.000 untuk menjaga pasokan menjelang puasa dan lebaran.



Sumber: Simirah Ver 2.0 diolah oleh Eggy P.R

MINYAKITA incaran Emak-Emak

Kementerian Perdagangan yang membidangi lahirnya merk minyak goreng MINYAKITA pada tahun 2009. Awal munculnya merk MINYAKITA adalah dari niat baik Pemerintah untuk menggantikan minyak goreng curah yang diindikasikan kurang higienis dibandingkan dengan minyak goreng kemasan. Selain itu kemasan juga dianggap lebih bisa menjaga pasokan dan stabilisasi harga karena bisa disimpan minimal 1 tahun.

Merek MINYAKITA bisa dipakai oleh produsen/pengemas minyak goreng apabila belum memiliki merk sendiri. Selama 14 tahun berjalan, meskipun diberikan fasilitas menggunakan merk MINYAKITA tidak banyak produsen/pengemas yang menggunakan merk tersebut. Saat itu hampir tidak pernah ditemukan minyak goreng MINYAKITA di pasaran.



Sumber foto: freepik.com

Berbeda dengan kondisi sekarang, MINYAKITA menjadi incaran Emak-emak, selain harganya murah, kualitasnya lebih bagus dibandingkan minyak goreng curah dan tentu saja higienis, karena sesuai dengan persyaratan ijin edar dan SNI.

Kebijakan DMO minyak goreng yang pada awalnya hanya mewajibkan pendistribusian minyak goreng curah sesuai dengan Permendag 33 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) yang berlaku mulai 1 Juni 2022.

Dalam rangka mempermudah dan mempercepat pendistribusian Minyak Goreng Rakyat, pada tanggal 6 Juli 2022, Menteri Perdagangan melaunching kembali Minyak Goreng Kemasan dengan Merek MINYAKITA. Kebijakan minyak kemasan dipayungi dengan terbitnya Permendag 41 tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Kemasan Rakyat (MGKR). Dalam perjalanannya mulai dari Juli 2022, Produsen/Eksportir diberikan pilihan untuk mendistribusikan minyak goreng DMO dalam bentuk curah ataupun kemasan merek MINYAKITA.

Realisasi DMO minyak goreng curah dari bulan Juni sd Desember 2022 mengalami penurunan secara signifikan dikarenakan adanya Kemasan MINYAKITA. Dimana minyak goreng curah terbesar didistribusikan pada bulan Juli 2022 dengan prosentase 91% dan terendah pada bulan Desember

2022 dengan prosentase 66%. Berbanding terbalik dengan Kemasan MINYAKITA, yang di re-launching pada Juli 2022 mengalami kenaikan signifikan dengan volume bulan November 2022 sebagai puncaknya yang mencapai volume 134.614 ton atau 44% dibandingkan dengan minyak goreng curah.

Melihat animo masyarakat terhadap kemasan MINYAKITA dan untuk menjaga pasokan menjelang lebaran Pemerintah mengharapkan untuk produsen bisa meningkatkan DMO kemasan MINYAKITA sebesar 40% dari target 450 ribu ton. Dengan harapan Emak-emak tidak kesulitan mendapatkan MINYAKITA pada saat puasa dan lebaran.

Realisasi DMO Minyak Goreng Rakyat pada bulan Februari adalah 361 ribu ton dibandingkan target 450 ribu ton dan pada bulan Maret realisasi juga mengalami penurunan dibandingkan pada bulan Februari 2023. Hanya Emak-emak menjadi lebih lega karena terjadi kenaikan pasokan dalam bentuk kemasan MINYAKITA dari bulan Januari 2023 sd Maret 2023 yang naik menjadi 38%.

Kebijakan DMO disinyalir masih menjadi obat mujarab dan solusi terbaik untuk masyarakat dan produsen eksportir. Meskipun keseimbangan belum terjadi antara ketersediaan kemasan MINYAKITA dengan permintaan Emak-emak, Pemerintah juga perlu memikirkan dampak moncernya MINYAKITA terhadap keberadaan merk premium yang permintaanya turun. Masih diperlukan evaluasi dan analisa terhadap kebijakan Pemerintah agar semua pihak merasa senang.

Peluang Pasar Ekspor Produk Kerajinan Bambu Indonesia di Inggris

Oleh: Hidayati Ratnaningsih, Widyaiswara Ahli Madya
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan

Indonesia adalah negara dengan potensi ekspor yang sangat besar, dengan berbagai macam produk yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh dunia. Pasar Inggris menawarkan peluang yang signifikan bagi bisnis Indonesia yang ingin memperluas portofolio ekspornya. Beberapa produk ekspor yang belum dimanfaatkan dari Indonesia ke Inggris termasuk produk kelapa, rempah-rempah, mebel, serat alami, dan turunan minyak sawit. Indonesia juga merupakan penghasil beragam serat alami, termasuk rotan, bambu, dan pandan. Bahan-bahan ini ramah lingkungan, berkelanjutan, dan dapat digunakan untuk membuat berbagai produk seperti keranjang, tikar, dan mebel. Permintaan untuk produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di pasar Inggris menawarkan kesempatan bagi eksportir Indonesia untuk mengeksport produk-produk ini. Serat alami ini serbaguna, tahan lama, dan memiliki tekstur dan nuansa yang unik, menjadikannya pilihan populer di antara konsumen Inggris.

Pasar Inggris saat ini semakin memperhatikan keberlanjutan dan ramah lingkungan dalam memilih produk konsumen. Oleh karena itu, ekspor barang-barang ramah lingkungan menjadi semakin penting. Indonesia memiliki banyak potensi dalam ekspor produk ramah lingkungan ke pasar Inggris, seperti produk kayu, bambu, rotan, serta produk turunan kelapa dan minyak sawit yang dihasilkan secara berkelanjutan. Produk-produk tersebut memiliki nilai tambah yang tinggi karena dihasilkan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan, sehingga dapat menarik minat konsumen Inggris yang semakin memperhatikan produk-produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, ekspor produk ramah

lingkungan dapat memberikan peluang ekspor yang menjanjikan bagi bisnis Indonesia.

Kerajinan bambu adalah salah satu produk ekspor yang belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh Indonesia ke pasar Inggris. Indonesia memiliki sumber daya bambu yang melimpah dan keterampilan pengrajin yang terampil dalam membuat berbagai produk bambu berkualitas tinggi. Pasar Inggris menawarkan peluang bagi bisnis Indonesia untuk mengeksplorasi produk kerajinan bambu dan memasarkannya ke konsumen yang mencari produk yang ramah lingkungan dan unik. Dengan permintaan yang meningkat untuk produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di Inggris, kerajinan bambu Indonesia dapat menjadi produk yang menarik bagi pasar Inggris.

Tujuan

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memberikan gambaran peluang pasar bagi produk kerajinan bambu (HS 46021100) di Inggris. Studi dalam penulisan artikel ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan *desk research* berupa penelusuran terhadap literatur dan sumber-sumber data yang relevan.

Profil Negara Inggris

Inggris adalah negara maju yang terletak di bagian barat daya Eropa, dan merupakan bagian dari Uni Eropa hingga tahun 2020. Dengan populasi sekitar 67 juta jiwa, Inggris memiliki ekonomi yang besar dan terdiversifikasi dengan GDP (*Gross Domestic Product*) sekitar 2,6 triliun dolar AS pada tahun 2021. Ekonomi Inggris terutama bergantung pada sektor jasa seperti keuangan, perbankan, teknologi, pariwisata, dan layanan publik.



Sumber foto: freepik.com

Sebagai negara maju, Inggris memiliki standar kualitas yang tinggi dan ketat dalam perdagangan internasional, baik dari segi kualitas produk maupun persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Inggris juga memiliki pasar yang terbuka dan kompetitif dengan persaingan yang sehat di berbagai sektor. Inggris adalah salah satu negara dengan pasar konsumen terbesar di Eropa dengan tingkat pengeluaran konsumen yang tinggi. Konsumen Inggris dikenal memiliki selera yang beragam dan cenderung mengutamakan produk berkualitas tinggi dan inovatif. Selain itu, Inggris juga memiliki pasar yang terbuka terhadap produk impor dan konsumen yang cenderung mencari produk-produk eksotis dan unik dari luar negeri.

Perdagangan Indonesia-Inggris

Berdasarkan data terbaru dari International Trade Centre, nilai perdagangan antara Indonesia dan Inggris pada tahun 2020 mencapai USD 2,4 miliar, dengan neraca perdagangan yang positif bagi Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya potensi dan peluang yang besar bagi kedua negara dalam meningkatkan kerja sama perdagangan.

Secara spesifik, ekspor Indonesia ke Inggris pada tahun 2020 mencapai USD 1,8 miliar, sedangkan impor dari Inggris ke Indonesia mencapai USD 0,6 miliar. Komoditas ekspor utama Indonesia ke Inggris adalah minyak kelapa sawit, kayu, karet, dan sepatu. Sementara itu, impor utama Indonesia dari Inggris meliputi mesin-mesin, kendaraan bermotor, dan produk farmasi.

Tren perdagangan antara kedua negara dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang positif. Pada tahun 2016, nilai perdagangan antara Indonesia dan Inggris mencapai USD 2,1 miliar, sedangkan pada tahun 2020, nilainya meningkat menjadi USD 2,4 miliar. Meskipun demikian, ada potensi untuk meningkatkan lagi nilai

perdagangan antara kedua negara, terutama dengan memperkuat kerja sama dalam sektor ekonomi yang potensial, seperti industri kreatif, pariwisata, dan energi terbarukan.

Dengan adanya potensi pasar dan kerja sama yang baik antara Indonesia dan Inggris, kedua negara dapat memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan nilai perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Peran pemerintah dan pelaku bisnis dalam memperkuat hubungan kedua negara juga menjadi kunci dalam meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi di masa depan

Pasar Ekspor Produk Kerajinan Bambu di Inggris

Tren Produk Kerajinan Bambu

Tren konsumsi yang mengutamakan keberlanjutan di Inggris telah menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Konsumen di Inggris terutama dari kalangan milenial dan Gen Z semakin memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan konsumsinya dan semakin memilih produk yang lebih ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial. Sebuah survey yang diadakan oleh Deloitte terhadap konsumen di Inggris pada tahun 2022 memaparkan beberapa hal yang dirasa penting bagi konsumen sebagai praktik yang etis dan ramah lingkungan. Kelima hal tersebut adalah:

1. Kemasan dan produk yang berkelanjutan
2. Pengurangan limbah dalam proses manufaktur/produksi
3. Komitmen pada praktik kerja yang etis (system upah yang adil, tidak ada pekerja di bawah umur dll)
4. Pengurangan jejak karbon
5. Penghormatan terhadap hak asasi manusia

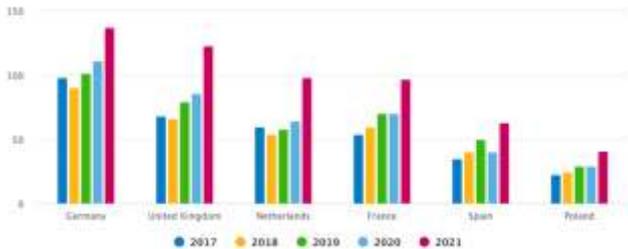
Berdasarkan tren pasar tersebut, produk kerajinan berbahan bambu memiliki potensi yang sangat besar, karena menggunakan bahan baku alami yang dapat didaur ulang. Beberapa bentuk kerajinan bambu yang memiliki peluang ekspor adalah: keranjang bambu sebagai wadah ramah lingkungan, keranjang/wadah portable yang dapat juga berfungsi sebagai kemasan, anyaman bambu sebagai elemen dekoratif.

Produsen/eksportir kerajinan bambu juga perlu menambahkan cerita tentang 3P yaitu People, Profit and Planet (Manusia, Keuntungan, dan Planet Bumi) di balik produksi produk kerajinan tersebut yang memiliki filosofi tentang keberlanjutan. Penceritaan (*storytelling*) tentang produk inilah yang akan membuat konsumen terikat secara emosional dan pada akhirnya bergerak untuk membeli produk tersebut.

Struktur Pasar

Secara umum, pasar keranjang dekoratif berbahan serat alami (bambu, rotan, eceng gondok dll) mengalami peningkatan tren konsumsi dari tahun ke tahun. Jerman merupakan negara importir terbesar produk keranjang dekoratif ini, disusul dengan Inggris, Belanda, Prancis, Spanyol dan Polandia.

Figure 2: Leading importing countries of basketry in € million



Gambar 1. Tren Impor produk keranjang dekoratif di Eropa (nilai Impor dalam juta Euro)
Sumber data: UN Comtrade

Keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) mengakibatkan perubahan struktur pasar yang signifikan. Saat ini pembeli dari Inggris memilih untuk mengimpor lebih langsung dari negara berkembang, bukan dari importir Eropa. Ini memungkinkan mereka untuk menghindari biaya tambahan sekarang karena mereka tidak lagi menjadi bagian dari pasar tunggal Uni Eropa. Hal ini tentu merupakan peluang yang sangat baik bagi produk-produk kerajinan bambu dari Indonesia.

Saluran Distribusi

Saluran yang digunakan untuk memasarkan produk kerajinan bambu di Inggris dan di Eropa pada umumnya mengikuti pola tradisional yaitu impor dilakukan melalui importir/pedagang besar yang memasok ke peritel. Jaringan ritel yang lebih besar sering kali membeli tanpa importir/grosir dan mengimpor sendiri, sementara semakin banyak peritel kecil yang mulai membeli langsung dari pemasok. Dalam beberapa kasus, agen pembelian juga berperan.

Importir/pedagang besar menangani prosedur impor. Mereka mengambil alih kepemilikan barang ketika mereka membeli dari eksportir, dan menanggung risiko penjualan produk selanjutnya. Pengembangan hubungan dan jejaring kerja jangka panjang antara eksportir dan importir dapat menghasilkan kerja sama tingkat tinggi dalam hal informasi pasar terkait desain yang sesuai untuk pasar, tren baru, penggunaan bahan, jenis finishing, dan persyaratan kualitas.

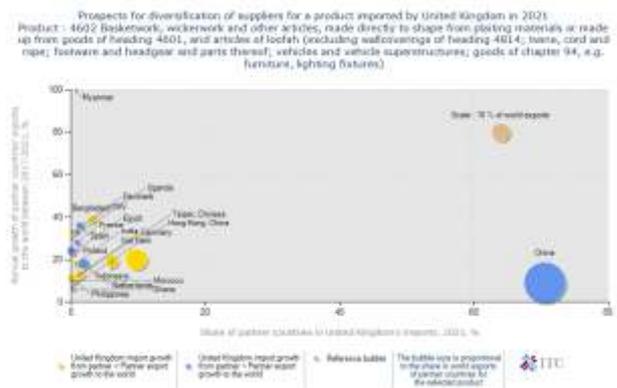
Peritel memiliki berbagai ukuran: peritel besar dan merupakan bagian dari sebuah jaringan, atau peritel kecil yang berdiri sendiri. Jaringan ritel yang lebih besar sering kali mengimpor langsung dari pemasok mereka

di negara berkembang. Banyak yang bahkan memiliki kantor pembelian sendiri di negara berkembang. Yang lainnya, terutama toko-toko independen yang lebih kecil, memesan di Eropa dari pedagang besar.

Selain saluran distribusi tradisional, saat ini saluran pemasaran online melalui e-commerce pun mulai berkembang. E-commerce terus berkembang, terutama sejak pandemi COVID-19. Cara terbaik eksportir kerajinan bambu untuk mendapatkan keuntungan dari hal ini adalah dengan memasok ke grosir atau peritel Eropa yang memiliki kehadiran online yang kuat. Bagi sebagian besar produsen, pemasaran melalui e-commerce bukanlah saluran yang terpisah. Melayani pembeli yang berjualan secara online tidak berbeda dengan bisnis reguler Anda. Peritel sering kali menggabungkan saluran online dan offline, tetapi cara memasoknya sama. Perusahaan yang hanya menjual secara online juga perlu menyediakan stok sebelum dapat menjual. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa menjual langsung ke konsumen di Inggris melalui situs web eksportir sendiri bisa jadi rumit dan mahal. Eksportir harus bertanggung jawab atas berbagai faktor seperti kewajiban purnajual dan sistem pembayaran untuk konsumen. Bagi sebagian besar eksportir dari negara berkembang, hal ini tidak memungkinkan karena membutuhkan pengembangan sistem dan biaya yang tidak sedikit.

Kompetitor

Cina dan Vietnam memasok lebih dari separuh impor keranjang dekoratif berbahan bambu di Inggris. Kedua negara ini terutama menyediakan keranjang yang diproduksi secara massal untuk segmen kelas bawah. Produk Indonesia, sendiri berada pada kelas mid-end consumer dengan pesaingnya merupakan hasil kerajinan bambu dan serat alam lainnya dari Bangladesh, dan Madagaskar.



Gambar 2. Pangsa pasar produk kerajinan bambu di Inggris. Sumber: International Trade Centre

Gambar 2 menunjukkan pangsa pasar produk kerajinan bambu di Inggris. Gambar lingkaran kuning menunjukkan bahwa pertumbuhan impor Inggris

terhadap negara mitra dagangnya lebih kecil dari pertumbuhan pasar ekspor negara mitra ke dunia. Sedangkan gambar lingkaran biru menunjukkan bahwa pertumbuhan impor Inggris terhadap negara mitra dagangnya lebih besar dari pertumbuhan pasar ekspor negara mitra ke dunia.

Akses Pasar Produk Kerajinan Bambu

Tarif Impor

Produk kerajinan bambu dalam bentuk keranjang dapat dimasukkan pada kelompok produk dengan Kode HS 4602110010 yaitu keranjang dari anyaman, dan barang anyaman lainnya, yang dibuat langsung untuk dibentuk dari bahan anyaman bambu atau dibuat dari barang anyaman bambu dari pos 4601, dan barang loofah (tidak termasuk pelapis dinding dari pos 4814; benang, tali dan tali; perlengkapan kaki dan tutup kepala dan bagiannya; kendaraan dan perlengkapan kendaraan; barang dari pos 94, seperti perabot rumah tangga, perlengkapan penerangan): Dari bahan anyaman, buatan tangan. Produk ini memiliki tarif impor MFN (Most Favoured Nation) sebesar 2%. Akan tetapi, Inggris memberikan tarif preferensi (Preferential tariff for GSP Countries) sebesar 0% untuk Indonesia dan 11 negara lainnya. Keringanan tarif preferensi ini tentu akan membuat produk Indonesia menjadi semakin bersaing di pasar Inggris. Untuk memanfaatkan tarif preferensi tersebut, eksportir perlu menyertakan Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO) Form A sebagai salah satu dokumen eksportnya.

Ketentuan Teknis Produk

Secara umum, produk kerajinan bambu yang diekspor ke Inggris harus memenuhi ketentuan keselamatan bagi konsumen. Produk yang dianggap dapat membahayakan konsumen akan ditolak untuk masuk ke wilayah negara Inggris. Untuk produk kerajinan bambu misalnya, harus dipastikan bahwa serat bambu yang digunakan sebagai anyaman sudah tidak tajam dan dapat melukai konsumennya. Produk yang diekspor harus mencantumkan informasi seperti identitas produsen dan referensi produk, sehingga produk yang berbahaya dapat dilacak. Jika diperlukan untuk penggunaan yang aman, produk juga harus disertai dengan peringatan dan informasi tentang risiko yang melekat.

Selain itu, produk kerajinan bambu juga tidak boleh mengandung zat-zat kimia yang berbahaya bagi manusia seperti:

- Beberapa pewarna azo yang digunakan terutama untuk produk tekstil
- Timbal dalam cat dan lapisan keramik
- Senyawa kadmium dalam berbagai aplikasi
- Arsenik dan kreosot sebagai pengawet kayu

- Penghambat api, termasuk TRIS, TEPA dan PBB
- Senyawa organostannik dan ftalat dalam PVC

Kesimpulan

Produk kerajinan bambu Indonesia memiliki potensi besar untuk memasuki pasar Inggris karena terdapat permintaan yang meningkat untuk produk ramah lingkungan dan keberlanjutan di negara tersebut. Sebagai salah satu bahan baku yang terbarukan dan ramah lingkungan, bambu dapat menjadi alternatif yang menarik bagi konsumen Inggris yang semakin sadar akan dampak lingkungan dari konsumsi mereka. Selain itu, Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam produksi kerajinan bambu, dengan berbagai produk seperti tas, furnitur, dekorasi, dan aksesoris yang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan berkualitas tinggi. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemasok utama kerajinan bambu di pasar Inggris.

Namun, peluang pasar kerajinan bambu Indonesia di Inggris juga harus memperhatikan beberapa aspek, seperti standar kualitas dan keselamatan produk yang diimpor ke Inggris. Produk bambu yang diimpor harus memenuhi persyaratan standar keamanan dan kualitas yang ketat, termasuk penggunaan bahan baku yang berkualitas dan proses produksi yang ramah lingkungan.

Selain itu, perlu juga memahami preferensi konsumen Inggris dalam memilih produk kerajinan bambu, seperti desain dan model produk yang menarik serta harga yang bersaing. Mengetahui dan menjalin jejaring bisnis yang baik dengan importir akan membantu ASN bidang perdagangan dalam memahami pasar Inggris dan kebutuhan konsumen serta membantu produsen Indonesia mengembangkan produk yang cocok dan memenuhi standar pasar.

Referensi

1. <https://www.cbi.eu/market-information/home-decoration-textiles/trends>
2. <https://www.cbi.eu/market-information/home-decoration-home-textiles/baskets-boxes/market-entry/#through-what-channels-can-you-get-basketry-on-the-european-market>
3. <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/united-kingdom/>
4. <https://www.macmap.org/en//query/results?reporter=826&partner=360&product=460211&level=6>
5. https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvp=1%7c826%7c%7c360%7c%7c4602%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1

Peluang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Sektor Peternakan Dalam Produksi UMKM



Sumber foto: freepik.com

Oleh: Indra Satria Siburian, Analis Kerjasama
Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Dirjen PDN

Tidak berlebihan jika usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dikatakan sebagai tulang punggung perekonomian bangsa Indonesia. Dalam ASEAN Investment Report 2022: *Pandemic Recovery and Investment Facilitation* yang dirilis pada Oktober 2022 diketahui bahwa terdapat lebih dari 65 juta UMKM di Indonesia per tahun 2021 dan menempati 99,9% dari dunia usaha aktif. UMKM mampu menyerap 97% dari tenaga kerja, memberikan sumbangsih sebesar 60,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan 14,4% terhadap ekspor nasional. Dengan fakta tersebut, pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan UMKM, salah satunya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) selama dan pascapandemi covid-19 dengan maksud melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Diharapkan dengan program PEN ini dapat menekan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dampak pandemi covid-19. Bersama dengan pemerintah, baik di tingkat pusat dan daerah, program pengembangan dan pemberdayaan UMKM juga dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, dan swasta.

Tulisan ini difokuskan kepada UMKM yang menghasilkan produk berupa barang jadi. Secara garis besar, kategori produk yang dihasilkan para pelaku UMKM adalah pangan dan non pangan. Pemanfaatan sumber daya alam lokal – sumber daya alam yang menjadi kekhasan dan keunggulan di daerah operasional pelaku UMKM – merupakan salah satu cara pelaku UMKM dalam menghasilkan produk, baik dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Sumber daya alam dari sektor-sektor tersebut tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hasil dari sumber daya alam tersebut dapat diolah menjadi produk-produk yang bernilai ekonomi tinggi dibanding jika hanya dipasarkan dalam bentuk mentah. Bahkan hasil sampingnya pun dapat dimanfaatkan lebih lanjut jika diolah dengan cara yang tepat.

Sebagai contoh, tentu banyak sekali produk pangan yang dapat dihasilkan dari sektor peternakan dengan memanfaatkan telur, daging, dan susu. Pelaku UMKM dapat mengolahnya menjadi bahan baku utama atau bahan tambahan dan pelengkap produk pangan, misalnya sosis, nugget, bakso, omelette, telur gulung, es krim, tambahan pada kue dan roti, minuman, dan lain-lain. Selain itu, hasil samping peternakan, seperti

bulu dan rambut hewan, cangkang telur dan tulang dapat dimanfaatkan menjadi produk-produk non pangan. Misalnya bulu ayam dijadikan sebagai kemoceng atau gantungan kunci, hiasan seperti dream catcher; rambut hewan menjadi pakaian, seperti jaket dan mantel; cangkang telur dan tulang menjadi aksesoris atau kerajinan. Sementara itu, kotoran ternak (feses dan urin) dapat dijadikan pupuk kandang. Cangkang telur dan tulang pun demikian, dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Diketahui bahwa cangkang telur dan tulang kaya akan kalsium dan fosfor, keduanya merupakan unsur mineral yang penting dalam tanah untuk tanaman (Puspitasari, et al (2018); Khalil, et al (2017)). Cangkang telur maupun tulang juga berguna sebagai bahan pakan ternak sebagai substitusi mineral industri. Kandungan kalsium dan fosfor pada cangkang telur dan tulang bermanfaat untuk pertumbuhan gigi dan tulang pada ternak. Selain itu, pemanfaatan limbah agroindustri seperti kulit singkong juga dapat dijadikan sebagai alternatif pakan ternak (Siburian, et al (2019)). Pemanfaatan limbah ini tentu dapat menekan biaya pakan yang menempati prosentase terbesar dalam operasional peternakan.

UMKM sebagai motor penggerak perekonomian nasional dan ekonomi kreatif diharapkan dapat memperluas peluang usahanya dengan lebih peka terhadap sumber daya yang ada di sekeliling. Seperti yang telah disebutkan di atas adalah contoh kecil saja, masih banyak peluang lainnya, secara khusus sumber

daya alam yang berasal dari sektor peternakan. UMKM harus mampu mengemas produk yang dihasilkan dengan baik dan memenuhi standar produk, sehingga memiliki nilai jual. Pemerintah juga senantiasa hadir dalam mendukung pengembangan UMKM, baik melalui pelaksanaan program pelatihan dan pemberian bantuan-bantuan. Masyarakat juga diharapkan untuk mau dan tidak malu menggunakan dan mengonsumsi produk dalam negeri sebab konsumsi produk dalam negeri meningkat, tentu bangsa berdaulat.

Referensi

- Khalil, Reswati, Ferawati, Kurnia, Y. F., and Agustin, F. 2017. Studies on Physical Characteristics, Mineral Composition, and Nutritive Value of Bone Meal and Bone Char Produced from Inedible Cow Bones. *Pak. J. Nutr.* 16(6): 426-434 (2017). DOI: 10.3923/pjn.2017.426.434
- Puspitasari, P., Yuwanda, V., Sukarni, and Dika, J. W. 2018. The Properties of Eggshell Powders with the Variation of Sintering Duration. *IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng.* 515 012104 (2019). DOI: 10.1088/1757-899X/515/1/012104
- Siburian, I. S., Mirwandhono, E., Yunilas, Wahyuni, T. H., and Hamdan. 2019. The Changes of Nutrient Content of Cassava Peel (*Manihot esculenta crantz*) That Fermented by Indigenous Microorganisms (IMO) for Animal Feed. *J. Pet. Integ.* 7(2): 2019.
- The ASEAN Secretariat. 2022. ASEAN Investment Report 2022: Pandemic Recovery and Investment Facilitation. United Nations Conference on Trade and Development.



Tingginya Porsi Impor Bahan Baku pada Industri Makanan dan Minuman

Oleh: Fitria Faradila, Analis Perdagangan Ahli Pertama
Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan, BKPerdag

Industri makanan dan minuman (mamin) memiliki kontribusi yang besar bagi Perekonomian Indonesia. Pada tahun 2022, kontribusi sektor ini terhadap PDB Indonesia mencapai 6,32%. Pasca Covid-19, industri mamin tumbuh cukup baik hingga saat ini. Seiring dengan pulihnya industri mamin, ekspor di sektor tersebut juga meningkat cukup signifikan. Kedepannya, industri mamin masih akan menjadi andalan penunjang PDB dan ekspor mengingat meningkatnya investasi di sektor ini sejak tahun lalu.

Pada tahun 2021, pertumbuhan industri mamin mencapai 2,54% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 1,58%. Kinerja positif industri mamin berlanjut hingga tahun 2022. Pada tahun 2022, kinerja industri mamin tumbuh signifikan menjadi sebesar 4,90%. Pertumbuhan industri mamin sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDB nasional sebesar 5,31%. Pertumbuhan PDB pada industri mamin merupakan yang tertinggi sejak tahun 2019 lalu.

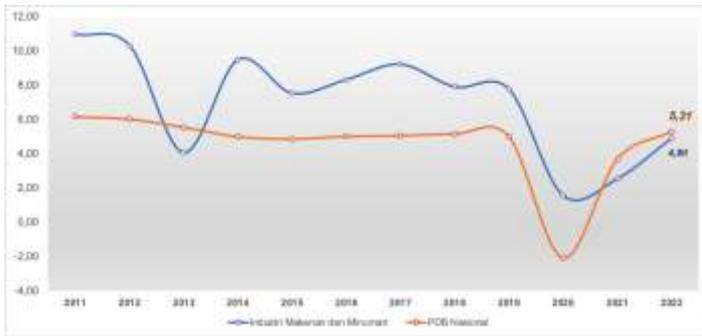
Aktivitas produksi industri mamin diperkirakan akan semakin meningkat mengingat mulai pulihnya ekonomi

pasca Covid-19. Dua tahun sejak virus Covid-19 merebak pertama kali, ekonomi sudah semakin pulih ditandai dengan mulai beroperasinya lini-lini bisnis di Indonesia, kantor pemerintahan, aktivitas pembelajaran, dan sektor pariwisata. Seiring dengan tumbuhnya ekonomi, permintaan akan produk minuman dan makanan semakin meningkat, sehingga dapat mendorong kinerja industri mamin. Kendati demikian, kondisi industri mamin belum sepenuhnya pulih jika dibandingkan dengan keadaan sebelum pandemi.

Dalam melakukan produksinya, industri mamin masih sangat bergantung pada bahan baku impor. Berdasarkan data dari 35 industri mamin pada publikasi BPS Statistik Industri Manufaktur Tahun 2019, rata-rata porsi nilai impor input terhadap total biaya bahan baku mencapai 14,4%. Beberapa industri mamin yang memiliki pangsa impor bahan baku terbesar yakni Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt dan Industri Malt, Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental, Industri Pengolahan dan Pengawetan

Buah-Buahan dan Sayuran Dalam Kaleng, Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya, Industri Penggilingan Serelia dan Biji-Bijian Lainnya (Bukan Beras Dan Jagung), serta Industri Makanan dan Masakan Olahan.

Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt dan Industri Malt yang termasuk dalam kode 1103 dalam Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) memiliki pangsa impor bahan baku terbesar yakni 88,80% terhadap total biaya bahan baku. Tepung Gandum merupakan bahan baku utama pada industri ini dengan pangsa 61,73% terhadap total biaya bahan baku dan seluruhnya didapatkan dari impor. Selain tepung gandum, bahan baku utama lainnya yang berasal dari impor yakni Yeast dan Malt yang masing-masing memiliki pangsa sebesar 11,48% dan 9,05% terhadap total biaya bahan baku industri minuman beralkohol hasil fermentasi malt dan industri malt.



Gambar 1. Perbandingan Pertumbuhan PDB Industri Makanan dan Minuman dan Nasional. Sumber: BPS, 2022

Industri lainnya yang memiliki pangsa bahan baku impor yang tinggi yakni industri Pengolahan Susu Bubuk Dan Susu Kental. Secara total, kontribusi bahan baku impor pada industri ini sebesar 56,41%. Susu segar merupakan komponen bahan baku utama dengan pangsa 99,22%. Adapun bahan baku susu segar yang berasal dari impor memiliki pangsa sebesar 55,97% terhadap total biaya bahan baku.

Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran Dalam Kaleng juga memiliki pangsa bahan baku impor yang tinggi sebesar 31,61% terhadap total biaya bahan baku. Buah Nanas merupakan bahan baku kontributor utama, namun pasokan seluruhnya berasal dari lokal. Adapun bahan baku impor terdiri dari Coil (pangsa 12,88% terhadap total biaya bahan baku), Easy Open (Penutup Kaleng) (pangsa 9,51% terhadap total biaya bahan baku), Gula Pasir (pangsa 5,83% terhadap total biaya bahan baku), dan Cold Rolled Coil (CRC) (pangsa 3,39% terhadap total biaya bahan baku).

Industri selanjutnya yang memiliki pangsa bahan baku impor yang tinggi adalah industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya dengan pangsa sebesar 30,72% terhadap total biaya bahan baku. Tepung

Gandum dan Bungkil Kedelai merupakan bahan baku impor utama dalam industri ini. Biaya pembelian bahan baku Tepung Gandum memiliki pangsa sebesar 10,60% terhadap total biaya bahan baku, sementara Bungkil Kedelai sebesar 8,42%. Adapun bahan baku impor lainnya berasal dari Gandum, Jagung dan Bumbu-bumbu.

Industri lainnya adalah industri Penggilingan Serelia Dan Biji-Bijian Lainnya (Bukan Beras Dan Jagung) dengan pangsa bahan baku impor sebesar 29,64% terhadap total biaya bahan baku. Bahan baku impor utama pada industri ini terutama berasal dari Gandum dengan pangsa 47,54% terhadap total biaya bahan baku. Kendati demikian, pangsa bahan baku Gandum yang berasal dari impor memiliki pangsa 24,25% terhadap total biaya bahan baku. Selain Gandum, bahan baku impor yang lainnya berasal dari Jagung Muda Kering dengan pangsa 4,60% terhadap total biaya bahan baku.

Tabel 1. Porsi Bahan Baku Impor Terhadap Total Biaya Bahan Baku pada Industri Makanan dan Minuman

KBLI 2013	Deskripsi Sektor	Jumlah perusahaan	Bahan Baku Impor (Ribu Rp)	Total Bahan Baku (Ribu Rp)	Porsi bahan baku impor terhadap total biaya bahan baku (%)
1103	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt Dan Industri Malt	6	13.925.355	25.422.698	88,80
1082	Industri Pengolahan Susu Bubuk Dan Susu Kental	28	4.388.018.182	7.788.870.688	56,41
1083	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng	6	522.810.648	1.658.974.578	31,61
1074	Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya	282	5.279.724.682	17.188.973.121	30,72
1061	Industri Penggilingan Serelia Dan Biji-Bijian Lainnya (Bukan Beras Dan Jagung)	71	12.822.864.578	43.845.277.543	29,64
1075	Industri Makanan Dan Masakan Olahan	76	598.168.903	1.905.729.184	31,39
1100	Industri Minuman Lainnya	37	725.792.206	2.970.962.966	24,42
1079	Industri Produk Makanan Lainnya	1043	4.392.719.858	19.511.903.638	22,50
1101	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur Dan Hasil Pertanian Lainnya	12	40.231.335	381.812.981	14,20
1077	Industri Bumbu-Bumbu Dan Produk Masak Lainnya	386	3.329.975.687	17.823.288.378	18,68
1084	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan Dan Sayuran	383	80.138.448	756.856.822	11,91
1081	Industri Pengolahan Susu Segar Dan Krim	31	841.240.428	5.809.539.617	14,49
1073	Industri Kakao, Coklat Dan Kembang Gula	132	2.804.429.565	14.558.699.139	19,27
1082	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biotika Air-Dalam Kaleng	114	865.877.700	10.625.708.417	8,15
1076	Industri Pengolahan Kopi, Teh Dan Herbal (Herb Infusori)	258	1.821.156.247	30.300.393.018	5,98
1104	Industri Minuman Ringkas	126	478.730.407	8.831.299.088	5,42
1065	Industri Penggilingan Beras Dan Jagung Dan Industri Tepung Beras Dan Jagung	421	1.076.721.675	24.341.910.338	4,42
1081	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Produk Ikan	892	838.800.984	28.168.310.221	2,98
1071	Industri Produk Roti Dan Kue	851	897.578.688	14.818.711.507	6,06
1081	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran Dengan Cara Dismakan, Dismatikan, Diberi-bekukan Dan Dibekukan	64	48.217.477	3.433.724.713	1,39
1072	Industri Gula	135	578.278.283	33.758.428.923	1,71
1063	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggapan	86	121.828.969	8.829.179.118	1,40
1125	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Biotika Air Lainnya	288	131.452.190	12.749.957.445	1,04
1055	Industri Pengolahan Es Krim Dan Sejenisnya	30	12.688.492	1.788.518.980	0,71
1084	Industri Kertas, Minyak Mentah Dan Minyak Goreng Kelapa, Tepung Dan Pelet Kelapa	117	87.962.443	12.985.898.773	0,68
1043	Industri Minyak Mentah/Mentri Kelapa Sawit	1086	3.826.128.113	550.032.879.220	0,69
1105	Industri Air Minum Dan Air Mineral	396	25.602.968	11.717.094.028	0,22
1069	Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya	18	1.805.885	925.214.938	0,19
1051	Kegiatan Ramah Pemasangan Dan Pengemasan Daging-Buahan Unggapan	6	0	156.417.857	0,00
1052	Kegiatan Ramah Pemasangan Dan Pengemasan Daging Unggapan	36	0	5583390108	0,00
1053	Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran	13	0	51974629	0,00
1041	Industri Minyak Dan Lemak Wakarti Dan Hewani (Bukan Kelapa Dan Kelapa Sawit)	20	0	112000062	0,00
1062	Industri Pati Dan Produk Pati (Bukan Beras Dan Jagung)	178	0	540543069	0,00
1101	Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi	15	0	805632452	0,00

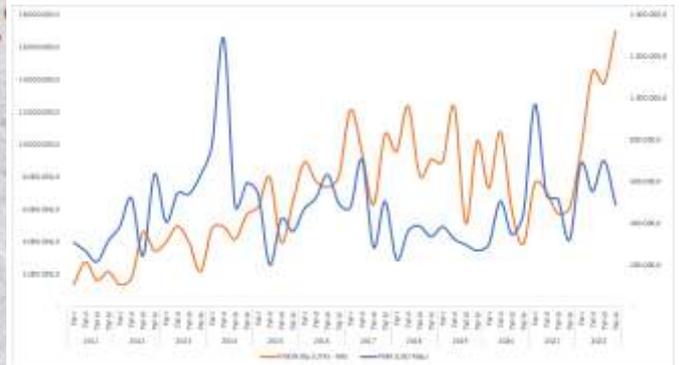
Sumber: BPS Statistik Industri Manufaktur Bahan Baku versi Tahun 2019

Selanjutnya, Industri Makanan Dan Masakan Olahan juga memiliki pangsa bahan baku impor yang cukup tinggi sebesar 26,56% terhadap total biaya bahan baku. Daging Sapi merupakan bahan baku utama dalam industri ini. Pangsa bahan baku Daging Sapi sebesar 50,26% terhadap total biaya bahan baku. Kendati



demikian, bahan baku daging sapi yang diimpor memiliki pangsa sebesar 26,28% terhadap total biaya bahan baku. Bahan baku impor lainnya berasal dari Ikan, Kacang Kedelai, Tepung Umbi-umbian serta Bumbu-bumbu.

Industri mamin merupakan industri yang sangat penting dan berkontribusi tinggi bagi perekonomian Indonesia. Kedepannya, pertumbuhan industri ini masih sangat prospektif. Dibandingkan tahun sebelumnya, investasi pada industri mamin meningkat pada tahun 2022. Bahkan investasi dalam negeri (PMDN) untuk industri ini sudah mengalami tren peningkatan sejak tahun 2020. Adapun investasi asing cenderung lebih fluktuatif, namun lebih tinggi dibandingkan perolehan investasi pada akhir tahun 2021.



Gambar 2. Perkembangan Investasi pada Industri Makanan dan Minuman dan Nasional. Sumber: BPS, 2022.

Dalam melakukan produksinya, industri makanan dan minuman masih mengandalkan bahan baku impor. Perkiraan adanya resesi ekonomi global dapat memberikan ancaman bagi industri ini. Pasalnya, ketergantungan industri mamin terhadap bahan baku impor cukup tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan dapat menyiapkan langkah antisipatif. Contohnya, dengan melakukan pertemuan bisnis antara industri mamin dengan pemasok lokal agar pelaku usaha di industri ini memiliki alternatif supplier lain di saat impor bahan baku terganggu akibat resesi ekonomi global.



Sumber foto: freepik.com

PeMbungkus: Agar Kemasan Sesuai Ketentuan

Oleh: J. Hendra Humberto Lbn.Tobing, Pengawas Kemetrollogian Ahli Pertama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang

Berkali-kali dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya kemasan atau packaging yang baik dalam meningkatkan nilai jual produk. Salah satu contoh pada saat memberikan sambutan pada Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) ke-46 dan Peresmian Pembukaan Jambore Nasional Kader PKK Tahun 2018 di Jakarta tanggal 2 Oktober 2018. Kepala Negara mengingatkan, barang sebagus apapun tanpa kemasan yang baik menjualnya itu tidak mudah, menjualnya itu sulit. Tetapi kalau barangnya sudah bagus, packaging-nya bagus, maka diyakini Kepala Negara menjualnya akan sangat mudah sekali [1].

Contoh lainnya saat meluncurkan Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas yang diadakan pada tanggal 3 Oktober 2022 lalu di Jakarta. Presiden mengatakan, “Ada tadi madu, biasanya dimasukkan botol, dijual di pasar-pasar tapi dengan packaging yang bagus dan branding nama yang baik pasti harganya akan lipat dua atau tiga kali. Hal-hal yang sentuhan-sentuhan seperti itu yang kita harapkan” [2].

Terakhir pada saat meresmikan Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Jayapura pada tanggal 21 Maret 2023 lalu. Presiden mengaku senang melihat

produk-produk kreasi dan inovasi anak muda Papua yang ada di PYCH. “Semuanya ada di PYCH ini, dari mulai tadi masuk di pembuatan handphone, pembuatan laptop, kemudian ada podcast, ada studio musik, ada studio untuk fotografi, dan juga memamerkan produk-produk yang ada di Tanah Papua dengan kemasan dan packaging, dengan branding yang sangat bagus sekali,” ujar Presiden [3].

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih mengatakan, 30 persen produk yang memiliki kemasan bagus bisa meningkatkan penjualan [4]. Menurutnya, kemasan produk adalah salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan sebelum memasarkan produk, baik di dalam negeri maupun ekspor ke luar negeri.

Untuk menyikapi arahan Bapak Presiden ini, Kementerian Perindustrian meluncurkan platform digital e-Kemasan IKM di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2021. “Sesuai arahan Bapak Presiden, bahwa packaging itu penting dan harus selalu diperbaiki, baik dalam segi branding, warna, maupun kemasan, sehingga saat masuk ke pasar, barang menjadi enak dilihat serta meningkatkan minat konsumen untuk membelinya. Arahan tersebut

menguatkan kami untuk terus meningkatkan daya saing IKM melalui peningkatan kualitas kemasan,” kata Plt. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kemenperin, Reni Yanita saat acara peluncuran tersebut [5]. Platform digital e-Kemasan IKM tersebut dapat diakses melalui laman <https://e-klinikdesainmerekemas.kemenperin.go.id/>.

Permasalahan yang diangkat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang diakses secara daring di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>), kemasan memiliki pengertian: hasil mengemas dan bungkus pelindung barang dagangan (niaga).

Berdasarkan definisi di atas, dapat dikatakan kemasan berfungsi sebagai pembungkus barang dagangan atau pelindung barang dagangan.

Salah satu sektor penghasil barang dagangan adalah sektor industri. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Tujuan akhir dari barang hasil kegiatan industri tersebut tentunya untuk diperdagangkan. Untuk mempermudah memperdagangkannya, barang yang dihasilkan tersebut dikemas sesuai kuantitasnya, yang dalam istilah Metrologi Legal disebut Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) adalah Barang yang dimasukkan ke dalam kemasan baik yang tertutup secara penuh maupun sebagian dan untuk mempergunakannya harus membuka kemasan, merusak kemasan, atau segel kemasan, dan yang kuantitasnya ditentukan sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.

Sayangnya di antara daftar peraturan perundang-undangan (regulasi) yang tercantum pada laman e-klinikdesainmerekemas.kemenperin.go.id, yang

Penulis akses pada tanggal 27 April 2023 tidak mencantumkan dasar hukum BDKT yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (UURL) beserta peraturan perundang-undangan turunannya. Padahal pengaturan tentang BDKT yang dimuat dalam UURL merupakan peraturan tertua terkait kemasan produk di antara peraturan-peraturan yang tercantum pada situs tersebut.

Pelaku Usaha yang paham pentingnya kemasan yang baik dan menarik berusaha membuat kemasan yang dapat meningkatkan nilai jual produknya. Berbagai hal yang dapat mendongkrak penjualan mereka terkait kemasan berusaha dipenuhi. Entah itu ukuran kemasan, pemilihan bahan kemasan, desain kemasan, atau hal lainnya. Namun masih banyak Pelaku Usaha yang tidak mengetahui bahwa terkait kemasan juga melekat pengaturan tentang BDKT. Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Metrologi Tahun 2021, baru 59,17% BDKT yang beredar sesuai ketentuan. Sedang berdasarkan Hasil Pengawasan Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional I Tahun 2021, 83% BDKT hasil pengawasan tidak sesuai ketentuan dengan rincian 56% tidak memenuhi ketentuan pelabelan dan 70% tidak memenuhi ketentuan pengujian kebenaran kuantitas. Sedang berdasarkan hasil pengawasan terhadap produk industri kecil Kabupaten Deli Serdang yang dipamerkan di Pusat Pengembangan Produk Unggulan Daerah (P3UD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021, hanya 11,43% yang sesuai ketentuan pelabelan BDKT.

Rendahnya hasil kesesuaian ini menurut Penulis salah satunya disebabkan tidak adanya kewajiban memeriksakan produknya kepada Unit Metrologi Legal sebelum diproduksi massal. Dalam norma hukum, Pelaku Usaha dianggap telah mengetahui terkait ketentuan BDKT yang berlaku (asas fiksi hukum) sehingga Pelaku Usaha harus memastikan BDKT tercantum pelabelan kuantitasnya (Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan) dan menjamin



Sumber foto: freepik.com

kebenaran kuantitasnya sesuai dengan yang tercantum pada kemasan dan/atau label (Pasal 137). Sisi Pemerintah melakukan pengawasan. Alhasil, jika Pelaku Usaha tidak memahami ketentuan terkait BDKT, besar kemungkinan ketika pengawasan, BDKT tidak sesuai dengan ketentuan. Untuk itu sosialisasi kepada Pelaku Usaha harus lebih gencar dilakukan. Namun dengan segala keterbatasan anggaran yang ada, yang Penulis yakin terjadi di banyak kabupaten/kota, Pengawas Kemetrolgion dituntut dapat melakukan sosialisasi terkait BDKT tersebut dengan cara-cara inovatif. Salah satu cara inovatif tersebut menurut Penulis dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Teknologi informasi dengan pemanfaatan jaringan internet telah berkembang luar biasa. Banyak aplikasi berbasis jaringan internet dibuat untuk membantu aktivitas manusia. Mudah-mudahan mengakses jaringan internet secara mobile dengan ponsel pintar. Didukung pula Pemerintah yang memprioritaskan pembangunan konektivitas digital di wilayah Indonesia hingga daerah yang terpencil. Presiden Joko Widodo menyebutnya dengan istilah "tol langit". Tol langit merupakan istilah dari proyek Palapa Ring yang di dalamnya terdapat penggunaan satelit [6]. Tak heran jika Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan banyaknya jumlah pengguna ponsel pintar mencapai 167 juta orang atau 89% dari total penduduk Indonesia [7].

Google adalah salah satu raksasa internet yang memiliki berkekhususan pada jasa dan produk internet dengan produk-produk yang dihasilkan meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring [8]. Dengan modal aplikasi milik Google, Penulis membuat PeMbungkus atau Pemeriksaan Mandiri Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

Perancangan Pembungkus

Ide dasar dari PeMbungkus adalah Pelaku Usaha dapat melakukan pemeriksaan sendiri produknya, dalam hal ini kesesuaian label dengan ketentuan terkait BDKT. Pelaku Usaha mengakses formulir untuk memasukkan data-data terkait produknya dan dalam selang beberapa saat akan menerima surel yang berisikan lampiran dokumen berformat PDF yang berisikan Panduan Pelabelan BDKT yang sesuai dengan produknya.

Penulis memanfaatkan beberapa aplikasi Google dan Add-on Autocrat dalam melakukan perancangan PeMbungkus, yaitu:

1. Google Formulir, yang digunakan sebagai formulir masukan data-data terkait produk Pelaku Usaha;
2. Google Spreadsheet, yang digunakan untuk menampung data-data yang dimasukkan oleh Pelaku Usaha untuk kemudian secara otomatis diolah dan dengan memanfaatkan Add-on Autocrat

menghasilkan dokumen berformat PDF yang dikirim ke alamat surel Pelaku Usaha; dan

3. Google Slide, yang digunakan untuk membuat templat halaman Panduan Pelabelan BDKT.

Untuk mempermudah penyebarluasannya, Penulis menggunakan jasa pemendek tautan seperti <https://s.id/> untuk menciptakan tautan yang gampang diingat.

Pertama sekali Penulis merancang Formulir PeMbungkus dengan Google Formulir yang akan menerima masukan data dari Pelaku Usaha. Formulir PeMbungkus meminta data-data dari Pelaku Usaha yaitu: surel (email), nama barang, merek, nama perusahaan, alamat perusahaan, status perusahaan, nomor Whatsapp, jenis BDKT, nilai kuantitas, dan satuan kuantitas. Tampilan Formulir PeMbungkus yang diakses oleh Pelaku Usaha lewat tautan s.id/pembungkus dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Formulir PeMbungkus

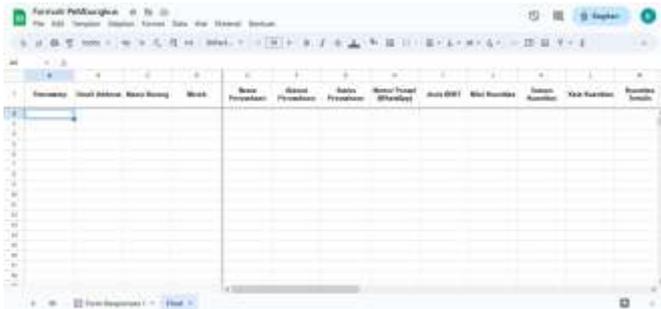
Selanjutnya Penulis membuat *template* halaman Panduan Pelabelan BDKT dengan menggunakan Google Slide (Gambar 2).



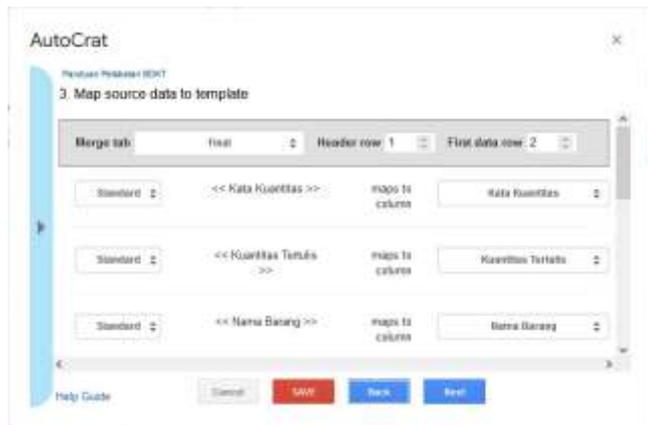
Gambar 1. Template Panduan Pelabelan BDKT

Data dari Formulir PeMbungkus akan ditampung dalam *sheet Form Responses 1* pada Google

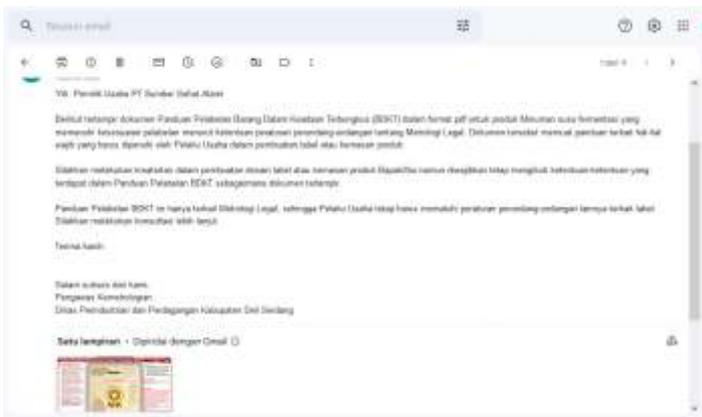
Spreadsheet. Penulis membuat *sheet* lain dengan nama Final (Gambar 3) yang berisikan formula-formula yang akan digunakan oleh Autocrat (Gambar 4) untuk menghasilkan dokumen Panduan Pelabelan BDKT berformat PDF dengan menggunakan templat yang telah dibuat dengan Google Slide sebelumnya. Kemudian dokumen berformat PDF akan dikirimkan ke alamat surel Pelaku Usaha (Gambar 5). Di sini proses akan berlangsung secara otomatis. Dokumen berformat PDF tersebut dapat dibuka untuk dilihat atau dicetak dengan aplikasi pembaca dokumen PDF.



Gambar 3. Tampilan Sheet Final pada Google Spreadsheet



Gambar 4. Tampilan Autocrat



Gambar 5. Surel yang Dikirim ke Pelaku Usaha

Tindak Lanjut

Selanjutnya diperlukan usaha untuk menyebarkan tautan Formulir PeMbungkus ini. Dapat dilakukan secara daring maupun luring. Secara daring dapat melalui media sosial atau pada saat kegiatan webinar. Secara luring dilakukan ketika melakukan kunjungan, penyuluhan, atau

pengawasan ke Pelaku Usaha. Tautan pendek Formulir PeMbungkus yang telah dibuatkan Kode QR juga dapat dicetak ke media seperti kartu nama atau selebaran.

Data yang dihimpun dalam Google Spreadsheet selanjutnya dapat digunakan untuk pembinaan Pelaku Usaha. Dengan data yang telah masuk, dapat dilakukan pengawasan ke alamat Pelaku Usaha untuk memeriksa langsung kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas BDKT.

Penutup

Adalah benar kemasan harus menjual. Tapi pada dasarnya yang dijual itu adalah kuantitasnya. Orang membayar sejumlah nilai tertentu untuk kuantitas yang sesuai. Kuantitas ini tertulis pada labelnya, dengan semua ketentuan yang mengikutinya. Inilah yang harus gencar disosialisasikan kepada Pelaku Usaha sehingga tertib ukur di segala bidang dapat terwujud.

Lewat PeMbungkus ini, Penulis berharap dapat menjadi tangga kecil untuk melewati tembok keterbatasan yang ada dalam sosialisasi BDKT. Penulis berharap ini dapat menjadi upaya yang efektif dalam mendukung tugas Pengawas Kemetrolgian. Semoga.

Referensi

1. <https://setkab.go.id/punya-kualitas-bagus-presiden-jokowi-optimistis-produk-kader-kader-pkk-bisa-tembus-pasar/>, diakses 27 April 2023
2. <https://setkab.go.id/luncurkan-kemitraan-inklusif-umkm-naik-kelas-presiden-ingin-pengusaha-besar-dan-umkm-kompak/>, diakses 27 April 2023
3. <https://setkab.go.id/resmikan-papua-youth-creative-hub-presiden-tingkatkan-kesejahteraan-dan-kemajuan-papua/>, diakses 27 April 2023
4. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4605046/kemenperin-kemasan-yang-bagus-bisa-dongkrak-penjualan>, diakses 27 April 2023
5. <https://kemenperin.go.id/artikel/23057/Kemenperin-Luncurkan-Platform-Digital-e-Kemasan-IKM>, diakses 27 April 2023
6. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/27/114700365/apa-itu-tol-langit-?page=all>, diakses 28 April 2023
7. <https://mediaindonesia.com/humaniora/389057/kemenkominformasi-89-penduduk-indonesia-gunakan-smartphone>, diakses 28 April 2023
8. <https://id.wikipedia.org/wiki/Google>, diakses 28 April 2023



Mengenal lebih dekat Kopi Instan

Oleh: Romadhoni Anto, Penguji Mutu Barang Ahli Pertama
Ditstandalitu, Kementerian Perdagangan

Kopi Instan merupakan salah satu produk pangan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat baik dari golongan muda sampai golongan tua. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengeluarkan suatu peraturan yang menjamin keamanan pangan dan mutu produk kopi instan sehingga memberikan perlindungan dan kesehatan bagi penikmat kopi instan. Keamanan pangan merupakan syarat penting yang harus dilakukan oleh produsen untuk mencegah hasil produksi dari cemaran biologis, kimia dan benda – benda lainnya yang dapat mengganggu kesehatan manusia.

Kementerian Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi Instan secara wajib yaitu SNI 2983:2014. Dalam permenperin tersebut, yang dimaksud dengan kopi instan adalah kopi yang telah melalui tahapan – tahapan proses produksi dan dilakukan proses pengemasan dalam bentuk kemasan ritel, bentuk curah atau bulk.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hasil perkebunan yang melimpah. Komoditas hasil perkebunan yang mempunyai banyak manfaat salah satunya adalah kopi. Kopi memiliki beberapa manfaat yang baik untuk kesehatan karena memberikan efek segar dan antidepressant pada tubuh. Manfaat kopi untuk kesehatan dapat diperoleh apabila mengkonsumsinya sesuai dengan takaran yang telah dianjurkan. Selain itu, komoditas kopi juga memiliki peranan penting bagi negara karena merupakan salah satu penyumbang devisa negara.

Kopi Instan menurut SNI 2983:2014 adalah produk kopi berbentuk serbuk atau granula yang diperoleh dari proses pemisahan biji kopi tanpa dicampur dengan bahan lain, bersifat mudah larut dalam air, dan tidak menghasilkan ampas. Kopi instan



Sumber foto: freepik.com

ini persiapannya lebih sederhana dibandingkan bentuk kopi yang lain karena sifatnya yang mudah larut dalam air. Penggunaan sedikit air dingin bertujuan untuk mengekstrak kandungan kopi secara bertahap sehingga tidak merusak aroma dan rasa dari kopi tersebut.

Tabel 1. Persyaratan Mutu Kopi Instan menurut SNI 2983:2014

No.	Kriteria uji	Satuan	Persyaratan
1	Keadaan		
1.1	Bau	-	Normal
1.2	Warna	-	Normal
2	Air	% (b/b)	maks. 4*/maks. 5**
3	Abu	% (b/b)	6 - 14
4	Kafein	%	min. 2,5****/ maks. 0,3*****
5	Otentisitas kopi		
5.1	Total Glukosa	%	maks. 2,46
5.2	Total Xylosa	%	maks. 0,45
6	Kelarutan dalam air panas/dingin	-	larut dalam 30 detik/3 menit
7	Cemaran logam		
7.1	Timbal (Pb)	mg/kg	maks. 2,0
7.2	Kadmium (Cd)	mg/kg	maks. 0,2
7.3	Timah (Sn)	mg/kg	maks. 40,0 / maks. 250,0*****
7.4	Merkuri (Hg)	mg/kg	maks. 0,03
8	Cemaran arsen (As)	mg/kg	maks. 1,0
9	Cemaran mikroba		
9.1	Angka lempeng total	koloni/g	maks. 3×10^3
9.2	Kapang dan khamir	koloni/g	maks. 1×10^2
10	Oktratoksins A	µg/kg	maks. 10
CATATAN: * Pengujian dengan metode oven vaccum ** Pengujian dengan metode Karl Fischer *** Kadar kafein kopi instan **** Kadar kafein kopi instan dekafein ***** Kadar Sn kopi instan yang dikemas dalam kaleng			

Tahapan Pembuatan Kopi

1. *Sorting* (sortasi)

Biji kopi yang akan dilanjutkan ke proses produksi menjadi kopi instan dilakukan proses sortasi yang akan mempengaruhi kualitas produksi. Proses ini dimulai dengan proses pembersihan biji kopi dari benda asing seperti batu kerikil. Proses sortasi biji kopi ini sangat penting dilakukan untuk mendapatkan kualitas kopi instan yang baik.

2. *Storage* (penyimpanan)

Biji kopi yang telah disortasi berdasarkan bobot dan ukuran dilakukan proses penyimpanan. Tempat penyimpanan biji kopi harus dilakukan pada tempat sejuk, kering, terlindung dari cahaya, dan memiliki kelembaban udara yang rendah. Faktor – faktor lingkungan yang terjaga dengan baik akan mempengaruhi kualitas kopi instan yang akan dihasilkan.

3. *Roasting* (Pemanggangan/Pengorengan/ Penyangraian)

Roasting pada kopi instan sama dengan tujuan roasting pada pembuatan kopi bubuk, yaitu menghasilkan cita rasa, aroma, dan kualitas yang baik. Proses roasting yang baik diperlukan untuk menghasilkan cita rasa yang disukai oleh konsumen. Proses roasting kopi yang umum digunakan umumnya menggunakan suhu 195 sampai 205 derajat celsius dan membutuhkan waktu sesuai tingkat kematangan yang diinginkan.

1. *Blending / Mixing* (Granulasi/Penggilingan kopi)

Proses penggilingan kopi menggunakan mesin penggilingan kopi yang mengubah bentuk biji kopi menjadi kopi bubuk. Proses penggilingan kopi dilakukan sampai menghasilkan tingkat kehalusan tertentu yang akan mempengaruhi cita rasa dan aroma kopi yang dihasilkan. Semakin kecil ukuran yang dihasilkan maka rasa dan aroma menjadi lebih baik.

2. Ekstraksi

Proses ekstraksi biasanya menggunakan air untuk melarutkan aroma dan rasa yang terkandung dalam kopi tersebut. Hal – hal yang harus diperhatikan dalam proses ekstraksi kopi antara lain :

- Bubuk kopi hasil penggilingan memiliki ukuran yang kecil, dimana semakin kecil ukuran kopi yang digiling akan memiliki cita rasa dan aroma yang baik.
- Perbandingan kopi dan air saat proses ekstraksi harus sesuai untuk mendapatkan rasa yang diinginkan.
- Temperatur air yang digunakan harus diperhatikan biasanya menggunakan suhu antara 92 sampai 96 derajat celsius.

3. Filtrasi

Proses filtrasi menggunakan bahan berpori yang bertujuan memisahkan komponen - komponen yang tidak larut dalam proses ekstraksi. Kopi instan tidak menghasilkan ampas saat proses ekstraksi berlangsung. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan yaitu teknik *sentrifuse*, teknik *evaporasi*, dan teknik *freezedrying*.

4. Sentrifugasi

Proses pasca ekstraksi yang dilakukan dengan cara mendinginkan ekstrak kopi yang dihasilkan dibawah suhu 0 derajat celsius.



Sumber foto: freepik.com

5. Evaporasi

Proses evaporasi berfungsi untuk mendapatkan kadar ekstrak ideal. Tahapan – tahapan pada proses ini dilakukan dengan dua cara yaitu menggunakan Teknik pengeringan semprot dan Teknik pengeringan beku.

6. Separasi/pemisahan

Proses pemisahan sesuai dengan kebutuhan hasil akhir olahan kopi yang dibutuhkan yaitu spray dried, aglomerasi, dan ekstraksi biasa. Pengemasan kopi instan harus memperhatikan kemasan standar yang telah ditentukan sebelum di distribusikan ke toko penjualan. Kemasan standar yang biasa digunakan dalam kopi instan sebagai berikut:

- Kemasan kopi instan menggunakan kertas membrane atau aluminium foil.
- Untuk produk ritel, kemasan yang digunakan berupa botol gelas dengan tutup plastik berulir.

Masyarakat Sebagai *Watchdog* Metrologi

Oleh: Penny Chariti Lumbanraja
Penera Ahli, DisKoperinDagri Kab. Asahan

Sumber foto: freepik.com

S elaku konsumen, masyarakat kerap tidak menyadari bahwa mereka sering dicurangi soal takaran yang tepat saat transaksi dagang. Bila transaksinya masih kecil, mungkin tidak terasa efek kecurangan. Namun, jika muatannya terbilang besar, mencurangi takaran akan sangat merugikan banyak orang. Mencurangi takaran merupakan salah satu tindak kejahatan karena telah memalsukan atau mengutak-atik ukuran dan timbangan.

Mencurangi takaran sering dilakukan oleh beberapa pelaku usaha demi mengutamakan kepentingannya. Mereka mengesampingkan hak-hak konsumen yang sepatutnya mereka hargai. Sebagaimana itu diatur dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 Ayat (1) huruf c. Pada pasal itu jelas ditegaskan, pelaku usaha dilarang memperdagangkan produk maupun jasa yang tidak sesuai dengan hitungan ukuran yang sebenarnya.

Sejatinya, masyarakat harus kritis memastikan ukuran produk yang menjadi haknya. Penyimpangan pada alat ukur bisa saja terjadi. Misalnya kasus mesin pompa di SPBU yang digunakan untuk mengisi BBM. Masyarakat dapat memastikan apakah mesin pompa tersebut telah dikalibrasi secara berkala, ditandai dengan adanya pembubuhan segel metrologi dari pihak pemerintah. Penyimpangan mesin membuat takaran tidak sesuai dengan batas toleransi, akibatnya ukuran BBM tidak tepat. Itulah sebabnya mesin tersebut harus diuji secara berkala oleh pegawai pemerintah tertentu.

Metrologi dalam dagang

Soal takaran dalam perdagangan dikaji dalam metrologi. Metrologi merupakan pengetahuan yang mengkaji soal pengukuran, kalibrasi dan akurasi di sektor industry maupun perdagangan. Berbicara soal pengukuran, tentu metrologi bermuara pada takaran yang berkenaan dengan transaksi

ekonomi, kesehatan hingga keselamatan. Kalau sudah menyangkut transaksi ekonomi, tentu ada peran keterlibatan konsumen dan pelaku dagang. Sayangnya, masyarakat kita masih minim literasi mengenai pentingnya meleak metrologi saat transaksi dagang berlangsung.

Mengapa bisa begitu? Tentu, disebabkan ukuran yang tepat masih menjadi persoalan. Siapa pihak yang dapat menjamin ukuran produk yang ditakar terhadap konsumen sudah tepat. Pertanyaan ini kerap muncul dalam benak konsumen. Pelaku usaha bisa saja berspekulasi yang ujung-ujungnya merugikan masyarakat. Ketika harga dan pengorbanan konsumen tidak sesuai dengan takaran yang layak dia terima, inilah letak persoalannya.

Bila menyangkut soal keamanan dan keselamatan, bisa dipandang dari sudut medis. Timbangan elektronik yang digunakan untuk menimbang ukuran maupun dosis obat harus dipastikan kebenarannya. Penyimpangan pada timbangan dapat berakibat fatal pada keselamatan seseorang.

Jujur, secara pribadi saya sebagai konsumen cenderung lebih percaya pada alat ukur dagang yang telah dilegalisasi oleh pihak berwajib. Disebutkan demikian, pihak berwajib merupakan pegawai pemerintah yang secara legal memberikan tanda sah pada alat ukur yang dijadikan sebagai transaksi dagang. Proses ini dinamakan peneraan.

Pegawai tera tersebut telah melalui serangkaian pendidikan, uji kompetensi serta pelatihan untuk bisa mengkalibrasi alat dagang yang dijadikan sebagai alat transaksi dagang. Bila pegawai tera ini tidak memahami sistem, maka yang muncul kerugian. Dampaknya bisa terjadi pada pelaku usaha ataupun bagi konsumennya. Sampai di sini, jelas sudah ada upaya dari pemerintah untuk menjunjung tinggi tertib ukur dagang yang adil serta jujur agar terhindari dari pihak-pihak yang berpatgulipat.

Pegawai tera memberikan pelayanan prima serta bertanggung jawab penuh memegang kendali kebenaran alat ukur. Alat ukur tersebut sebelum dilegalisasi harus melalui serangkaian uji untuk melihat titik nol (kebenarannya). Ketika telah diuji sesuai prosedur, barulah alat tersebut layak diterjunkan ke masyarakat sebagai media pengukuran perdagangan.

Sayangnya, masyarakat masih menutup mata perihal pentingnya hal demikian. Pedagang kecil misalnya, mereka belum tentu mau diedukasi mengenai informasi ini. Apakah itu karena tidak ada sosialisasi atau memang mereka bersikap acuh tak acuh bahkan mungkin saja sengaja berlaku curang. Mereka sudah terlebih dahulu terbebani dengan biaya retribusi. Biaya retribusi yang cenderung kecil itu mereka anggap sebagai beban. Padahal, penerapan alat tera yang benar ini bukan hanya untuk melindungi nasib konsumen, tetapi juga pelaku usaha, agar jangan sampai merugi.

Di pelbagai daerah tanah air, pengetahuan soal metrologi telah berjalan dengan baik. Daerah yang masih kesulitan untuk membenahi pola pikir pelaku usaha dan masyarakat diharapkan mengadopsi keberhasilan sistem di daerah lain. Namun, faktanya ketika tertib tera ini dijalankan, kerap ditemukan sejumlah pelaku usaha cenderung bertindak curang. Sehingga mereka berusaha menghindari bila ada pelayanan peneraan turun ke lapangan. Ada yang sembunyi-sembunyi bahkan menutup usaha-nya secara tiba-tiba.

Fakta di lapangan

Kenyataannya, mencurangi alat ukur kerap terjadi di lapangan. Saya kerap menemukan kecurangan seperti itu di lapangan. Bahwa alat ukur yang telah dikalibrasi pun masih bisa diselewengkan. Apalagi, jika alat ukur tersebut tidak pernah diperiksa oleh pegawai tera. Pelaku usaha berdalih, dengan mengatakan, segel metrologi yang rusak itu terjadi tanpa disengaja. Ini jelas kejahatan besar, karena pelaku usaha meraup untung besar di atas jerih payah konsumen. Mereka menambah pundi-pundi kekayaannya dengan mencurangi timbangan. Keuntungannya bisa berlipat-lipat. Ironinya, mencurangi timbangan dianggap sebagai kewajaran.

Jelas, kecurangan seperti ini tak boleh dibiarkan. Masyarakat melek metrologi harus berdiri sebagai anjing penjaga yang paling galak menggonggong jika menemukan ada penyimpangan alat ukur atau timbangan. Pengawasan kebenaran takaran tidak hanya menjadi tugas pegawai tera. Peran serta masyarakat adalah keniscayaan. Pelaku usaha yang licik cenderung hanya memikirkan kepentingannya

serta bagaimana mendulang untung fantastis sekalipun harus menganggangi aturan dan norma hukum yang berlaku.

Kesulitan kita adalah bagaimana menyatukan pola pikir masyarakat dengan pihak pemerintah agar dapat berjalan searah. Itu kendalanya. Mental yang kelihatannya sederhana telah mendarah daging seperti tunggu rugi bablas dulu baru bertindak. Atau tunggu tiba pengawasan di lapangan barulah jera. Pola pikir seperti ini yang menjadi kesusahan bersama. Keadaan seperti ini menjadi hambatan untuk membuat sistem perdagangan di Indonesia menjadi maju. Kita akan berhadapan dengan krisis kepercayaan konsumen.

Mengedukasi pelaku usaha hingga masyarakat tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Beberapa pihak mungkin antusias, tetapi bisa saja sewaktu-waktu dipengaruhi oleh rekan dagangnya yang acuh tak acuh. Seperti kasus, tahun ini si pelaku dagang mau menera alat dagangnya, tetapi tahun depan belum tentu, karena melihat pelaku usaha yang lain tidak menera alat dagangnya. Dengan keadaan seperti ini kita menjadi skeptis.

Metrologi menjadi acuan bagi masyarakat untuk membangun kepercayaannya pada penerapan sistem dagang di Indonesia. Metrologi mengurangi hambatan teknis untuk perdagangan. Alat dagang dengan ukuran tepat, transparan, andal serta dapat dipercaya tentu sejalan meningkatkan Indeks Kepercayaan Konsumen Indonesia. Meningkatnya Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) sejalan dengan meningkatnya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Tentu konsumen seharusnya lebih percaya membeli kebutuhan pokok yang diukur dengan alat takar yang telah dilegalkan ketimbang alat takar yang masih diragukan kebenarannya. Jadi, konsumen dapat menilai sendiri apakah si pelaku usaha jujur dengan timbangannya atau tidak. Semua itu terlihat dari alat timbangan yang digunakan.

Ke depannya, pemerintah optimis, masyarakat Indonesia sebagai konsumen dapat teredukasi dengan baik. Akan ada masanya dimana masyarakat yang melek metrologi tidak akan mau membeli pada toko/kedai/kios bilamana timbangannya belum ditera oleh pihak pemerintah.

Ukuran yang tidak sebanding dengan pengorbanan masyarakat tentu menjadi perhatian pemerintah. Penyimpangan seperti ini kelihatannya kecil, tetapi merugikan hajat hidup masyarakat sebagai konsumen Indonesia. Menjaga kepercayaan konsumen hukumnya adalah wajib. Harga kebutuhan manusia semakin melambung akibat inflasi, jangan sampai ikhwal ketidakjujuran alat ukur menjadi persoalan yang semakin meresahkan masyarakat Indonesia.

(*)

Yuk, Waspadai Kecurangan Transaksi Jual Beli di Pasar!

Oleh: Baiq Dewi Ayu Husni Juniarti
Penera Ahli, Disperindag Kab. Lombok Barat

Pasar merupakan tempat untuk melakukan transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli. Dalam transaksi jual beli, pedagang dapat memperoleh untung untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Sedangkan pembeli memperoleh barang yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jual beli merupakan proses transaksi pemindahan hak kepemilikan suatu benda antara pedagang dan pembeli yang didahului dengan akad jual beli. Dalam Islam, jual beli dihalalkan berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Dalam proses transaksi jual beli, untuk barang – barang tertentu biasanya menggunakan alat bantu dalam menentukan jumlah barang yang akan diperjualbelikan. Alat bantu tersebut digunakan untuk menakar dan menimbang barang. Dalam Metrologi Legal, alat tersebut disebut dengan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang disingkat menjadi alat UTTP. Alat UTTP yang biasa digunakan untuk transaksi di pasar biasanya berupa timbangan meja, dacin, timbangan sentisimal, timbangan bobot insut, timbangan pegas dan timbangan elektronik.

Dalam transaksi jual beli, sering ditemukan kecurangan yang dilakukan oleh pedagang agar memperoleh untung/laba yang sebanyak-banyaknya.

Sumber foto: freepik.com

Kecurangan merupakan perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kecurangan yang paling sering ditemukan dalam transaksi jual beli adalah pengurangan takaran timbangan yang dilakukan dengan sengaja oleh pedagang. Hal ini sangat merugikan konsumen. Untuk itu, pembeli / konsumen harus pintar mengenali kecurangan yang dilakukan oleh pedagang.

Dalam mengurangi takaran timbangan, yang dilakukan pedagang adalah memberikan pemberat pada wadah penimbang yang tidak terlihat oleh pembeli. Hal ini mengakibatkan beban yg ditimbang lebih berat dari berat seharusnya. Pemberat yang biasa digunakan adalah, magnet, potongan besi dan batu.



Pemberat berupa magnet yang diletakkan di bawah tembor timbangan meja. Adanya magnet ini mengurangi jumlah berat beban yang seharusnya. Peletakan magnet di bawah tembor ini sulit terlihat oleh pembeli.

Sebagai konsumen, apa yang harus dilakukan untuk menghadapi kecurangan yang dilakukan oleh pedagang tersebut? Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk mengantisipasi kecurangan yang dilakukan oleh pedagang:

- Sebelum pedagang melakukan penimbangan, pastikan bahwa timbangan yang digunakan menunjukkan angka 0 untuk timbangan yang memiliki skala, seperti timbangan pegas, timbangan sentisimal, timbangan bobot insut, dacin dan timbangan elektronik.
- Pastikan bahwa tidak ada pemberat yang melekat di timbangan yang digunakan oleh pedagang.
- Periksa timbangan yang digunakan oleh pedagang apabila terlihat hal yang mencurigakan.
- Bila ditemukan kecurangan, laporkan ke pihak terkait seperti Unit Metrologi Legal setempat dan Badan Penyelenggara Sengketa Konsumen (BPSK) setempat.



Gotong Royong, Kerjasama Antar Anggota dan Kreativitas Pengurus Kunci Sukses Menjadikan Koperasi Maju dan Bermanfaat

Oleh: Rachmat Adiwibowo, Penguji Mutu Barang Ditstandalitu, Kementerian Perdagangan

Sumber foto: freepik.com

Koperasi merupakan badan usaha yang lahir dari berkumpulnya sejumlah orang dalam satu kebutuhan yang sama dan koperasi ini menopang ekonomi rakyat kecil. Pada Bulan Maret 2023 sendiri, Kementerian Koperasi dan UKM dalam laman website nya menyampaikan bahwa koperasi di seluruh Indonesia berjumlah 130.565, Modal usaha 269.368 Miliar dan anggota yang sudah tercatat sebanyak 37.029.192. Kata koperasi diambil dari kata cooperation, yang artinya bekerjasama.

Berdasarkan Undang - Undang No 25 tahun 1992, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan sejumlah orang yang memiliki latar belakang kebutuhan yang sama, dimana kegiatannya berlandaskan atas ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Sementara itu, menurut Mohammad Hatta selaku Bapak Koperasi, mengatakan koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang berlandaskan atas asas kekeluargaan dan gotong royong. Dengan demikian, pengelolaan koperasi mengarah pada kegiatan bekerjasama untuk tolong-menolong memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya, sehingga tidak hanya berorientasi pada profit semata. Itulah salah satu sebab mengapa keberadaan koperasi sangat bermanfaat dan diharapkan banyak orang di lingkungan manapun.

Proses lahirnya koperasi berjalan tidak begitu saja secara mudah dan memerlukan proses yang cukup panjang, untuk mendapatkan rasa saling memiliki dari anggotanya. Pada umumnya, koperasi tidak dilahirkan dan diperjuangkan oleh orang-orang yang berada secara

finansial dari sisi ekonomi, justru Gerakan berkoperasi ini bermula sebagai bentuk perlawanan terhadap kapitalisme yang saat itu melahirkan penderitaan ekonomi dan sosial terhadap rakyat.

Koperasi lahir di tengah tengah masyarakat harus memiliki daya tarik untuk menjadi magnet alasan dari masyarakat untuk ikut bergabung menjadi anggotanya, contoh hal nya Koperasi Bina Warga Sejahtera (UKM Mart Kota Bekasi), Teluk Pucung, Kota Bekasi, Koperasi ini lahir di tengah tengah pandemi Covid 19 yaitu 8 November 2020, Koperasi ini lahir di saat masyarakat yang pada saat itu sedang berjuang dalam menghadapi pandemic covid 19, dimana saat itu banyak keluarga yang menjadi tulang punggung keluarga nya mengalami pemutusan hubungan kerja, berjualan juga tidak mudah karena daya beli masyarakat yang saat itu rendah, kemudian pembatasan pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain dan menghindari pertemuan secara langsung, untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19.

Koperasi ini lahir berawal dari terbentuk nya Komunitas Entrepreneur Teluk pucung, Kota Bekasi, dimana spirit dari komunitas ini adalah menjadi wadah untuk UKM/Entrepreneur dalam bersilaturahmi dan media dalam berbagi ilmu dalam berwirausaha. Komunitas ini bergerak untuk memfasilitasi UKM/Entrepreneur dalam mendapatkan pembinaan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha dan juga sebagai sarana berbagi tips dan trik dalam berwirausaha, agar anggotanya bisa

mendapatkan banyak pembelajaran dalam mengembangkan produk dan usaha nya kedepan.

Dari berbagai kegiatan dan pertemuan tersebut akhirnya membuat soliditas anggota nya menjadi semakin erat, untuk saling berbagi dan membantu satu sama lain. Bermula dari rasa senasib dan sepenanggungan, berkemampuan ekonomi yang lemah, dan menderita karena beban ekonomi yang cukup berat, maka dengan ini rakyat merasa untuk berkumpul dan saling bekerjasama untuk menolong diri sendiri dan orang lain yang bernasib sama. Oleh sebab itulah, akhirnya mereka berpikir mencari solusi untuk dapat keluar dari keadaan tersebut dan secara bersama membentuk Gerakan ekonomi dengan modal bersama. Yang Kemudian lahirlah badan usaha Bersama yang sekarang kita kenal dengan nama koperasi

Sampai dengan saat ini, koperasi semakin berkembang di negara-negara tetangga dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada para anggotanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya permasalahan ekonomi yang dapat diatasi dengan beroperasinya koperasi

Masyarakat Indonesia yang mengedepankan asas kekeluargaan dan gotong royong, membuat koperasi sebagai Badan usaha yang sangat tepat untuk diaplikasikan di negara ini. Asas kekeluargaan dan gotong royong tersebut sudah menjadi budaya dan kebiasaan hidup yang sudah turun-temurun dari nenek moyang bangsa ini sehingga tidak mengherankan bila asas kekeluargaan dan gotong royong yang diusung oleh koperasi bisa menyatu dengan masyarakat.

Tujuan dan fungsi koperasi

1. Menciptakan dan Membangun Jiwa Kemandirian

Salah satu fungsi dari koperasi, yaitu Menciptakan sekaligus membangun potensi dan kemampuan anggotanya secara khususnya dan masyarakat secara umum nya serta juga, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan taraf ekonomi rakyat.

Tugas ini tentunya tidak mudah, namun bila kita dapat melakukannya dengan konsisten walaupun masih sederhana, hal ini akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan skill dalam berwirausaha di tengah tengah masyarakat yang haus akan ilmu. Koperasi dapat memberikan sosialisasi dan pelatihan terkait teknik promosi di sosial media dan digitalisasi terkait produk UMKM yang penting untuk mereka kuasai, dimana saat ini konsumen sudah tidak banyak berada di pasar atau jalan, namun sekarang konsumen sudah ada di media sosial seperti Facebook, Whatsapp, Instagram, tiktok dsb, sehingga penguasaan terkait media sosial bagi UMKM yang saat ini hidup di era digital merupakan hal yang wajib mereka kuasai untuk bisa mempromosikan produknya.

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Fungsi berikutnya dari koperasi, yaitu meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia dan masyarakat dengan cara memberikan bimbingan dan pelatihan yang dapat memberikan peningkatan skill dari masyarakat. Dengan Kualitas SDM yang semakin baik dan meningkat akan memberikan manfaat besar bagi perekonomian bangsa ini.

Berikut contoh upaya dalam meningkatkan SDM yang dapat dilakukan oleh koperasi, yaitu memberikan pelatihan keterampilan untuk menghasilkan produk kerajinan tangan yang tentunya akan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, menghasilkan produk yang berkualitas baik dan tentunya memiliki daya jual yang tinggi di tengah masyarakat, dengan memberikan berbagai training ini akan membuat anggota dan masyarakat mendapatkan *skill* dalam menghasilkan produk baru yang berkualitas dan memiliki daya jual.

3. Meningkatkan Ketahanan Keluarga dalam bidang Ekonomi.

Fungsi selanjutnya dari koperasi, yaitu meningkatkan ketahanan keluarga dalam bidang ekonomi. Fungsi ini bisa disebut sebagai pondasi kekuatan dan ketahanan perekonomian bangsa dengan menjadikan koperasi sebagai pedoman, Produk UMKM yang dibuat dari Rumah tangga masyarakat ini tentunya akan memperkuat ekonomi kerakyatan, dimana berbagai produk yang berkualitas juga bisa dihasilkan dari Rumah Tangga yang ada di masyarakat, dan peran koperasi untuk memasarkannya.

4. Mewujudkan dan Meningkatkan Perekonomian Bangsa

Fungsi selanjutnya dari koperasi, yaitu mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Bangsa dengan mengusung asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, dimana pengurus nya dipilih secara demokratis dalam Rapat Anggota.

Kesimpulan

Koperasi adalah Badan usaha yang di bangun oleh Masyarakat atas dasar kesamaan nasib dan merupakan langkah baik yang dilakukan bersama sama untuk dapat saling membantu satu sama lain..

Koperasi memiliki peran, fungsi dan manfaat yang sangat besar bagi anggotanya. Koperasi berperan memasarkan produk anggotanya yang merupakan produk yang dihasilkan dari rumah tangga sehingga hal ini juga akan memperkuat ketahanan ekonomi kerakyatan.

Metrologi dalam Teknologi: Kecil, Pintar, Tukang Ukur (*Smartwach*) Bagian 2

Oleh: Mohamad Nurdinsyah Ekapujakesuma
Penera Mahir, Bidang Metrologi Dinperindag Kab. Banyumas

Kecil, pintar, tukang ukur. Kira-kira apa yang kalian pikirkan pertama kali jika mendengar kata-kata tersebut? Mungkin ada yang memikirkan seorang penera, juru timbang, atau bahkan tukang ukur tanah. Mereka memang tukang ukur, mereka pintar, tapi mereka tidak kecil. Ini adalah sebuah benda canggih. Benda kecil yang dimaksud adalah *Smartwatch* atau jam tangan pintar.

Pada majalah *Kompeten* volume I no. 1 tahun 2022 menjelaskan apa saja sistem kerja dari beberapa jenis pengukuran yang dapat dilakukan oleh *smartwatch*. Edisi kali ini, masih menjelaskan apa saja sistem kerja dari *smartwatch*, diantaranya yaitu:

Pengukuran Tekanan Udara dan Ketinggian

Smartwatch saat ini banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan ekstrem seperti hiking maupun trail running. Pada kegiatan outdoor salah satu hal penting adalah navigasi, antara lain tahu dimana lokasi/posisi dan berapa ketinggian dari lokasi tersebut. Dengan menggunakan GPS pada *smartwatch* sebenarnya sudah dapat mengetahui lokasi/posisi dan juga ketinggian lokasi, namun terkadang pada suatu titik tertentu sinyal GPS tidak terlalu bagus, sehingga pengukuran tidak akan akurat. Oleh karena itu saat ini pada beberapa *brand* dan tipe *smartwatch* sudah dilengkapi dengan *air-pressure (barometric)* sensor.

Barometer pada dasarnya adalah alat untuk mengukur tekanan udara/atmosfer pada suatu titik lokasi. Perangkat ini bisa juga digunakan untuk meramalkan cuaca. Tekanan udara yang lebih tinggi biasanya menandakan langit yang cerah, ketika perlahan-lahan turun, langit yang cerah dapat berubah

menjadi hujan., dan ketika tekanan udara menurun dengan cepat, biasanya dapat terjadi badai. Pada *smartwatch* tekanan udara ditampilkan dengan satuan hPa.

Barometer pada *smartwatch* juga dapat digunakan untuk mengukur ketinggian suatu lokasi. Tekanan udara akan menurun seiring dengan meningkatnya ketinggian suatu lokasi. Nilai perubahan tekanan udara ini yang kemudian dikonversi menjadi ketinggian. Sebagai gambaran, tekanan udara rata-rata 1013 hPa di permukaan laut.



Contoh tampilan grafik perubahan ketinggian pada *smartwatch* (sumbu x = waktu (menit); y = ketinggian (m))

Pengukuran Kecepatan

Pada saat berlari, berjalan maupun bersepeda salah satu parameter yang diukur adalah kecepatan. Berapa kecepatan rata-rata pada saat melakukan aktivitas tersebut. Salah satu yang dapat dijadikan tolak ukur untuk melihat performa bagi atlet khususnya atlet lari adalah kecepatan (*pace*).

Pengukuran kecepatan merupakan pengukuran tidak langsung karena membutuhkan nilai atau data dari hasil pengukuran lainnya. Data yang dibutuhkan untuk mengetahui kecepatan antara lain, jarak dari suatu aktivitas dan waktu yang dihabiskan untuk melakukan aktivitas tersebut. Sebagai contoh jika seseorang berlari sejauh 5 km dengan waktu 30 menit, maka kecepatan (*pace*) rata-ratanya adalah 6:00 menit/km artinya untuk menempuh jarak 1 km orang tersebut membutuhkan waktu selama 6 menit. Selain waktu rata-rata yang ditampilkan, pada *smartwatch* juga menampilkan data split kecepatan untuk setiap km dan juga dapat menampilkan grafik perubahan kecepatan dari mulai awal sampai dengan akhir aktivitas.



Contoh tampilan grafik pengukuran kecepatan (*pace*) pada *smartwatch* (sumbu x = waktu (menit); y = kecepatan (min/km))

Pengukuran Jumlah Kalori

Kalori yang dimaksud disini adalah jumlah energi yang digunakan pada saat melakukan suatu aktivitas. Bagi seseorang yang sedang melakukan suatu program diet, jumlah kalori ini cukup penting untuk dipantau karena pada saat melakukan program diet jumlah kalori yang masuk (berasal dari makanan/minuman yang dikonsumsi) setidaknya harus kurang dari jumlah kalori yang keluar (berasal dari *Basal Metabolik Rate* (BMR) dan dari aktivitas harian maupun dari aktivitas olahraga).

Sama halnya seperti pengukuran kecepatan, pengukuran jumlah kalori pada *smartwatch* merupakan jenis pengukuran tidak langsung karena membutuhkan data dari hasil pengukuran lainnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya jumlah kalori yang terukur pada *smartwatch* antara lain berat badan, tinggi badan, umur, jenis aktivitas, tingkat/intensitas aktivitas (dapat diketahui dari *heart rate*), waktu aktivitas, dan lain-lain. Satuan ukuran yang digunakan dalam pengukuran kalori adalah Cal/kkal.

Selain dari beberapa jenis pengukuran yang disebutkan diatas, ada beberapa tipe *smartwatch* yang mampu

melakukan pengukuran suhu tubuh, VO2max, tekanan darah, tingkat kebugaran, tingkat stress, dan pengukuran lainnya. Perkembangan teknologi semakin pesat, mempermudah kita dalam melakukan berbagai hal. Jika beberapa tahun yang lalu fungsi dari jam hanya untuk menunjukkan waktu, sekarang benda kecil ini mampu melakukan banyak hal termasuk memantau aktivitas harian, hingga mampu memantau tingkat kesehatan seseorang. Selain itu, *smartwatch* juga digunakan dalam membantu program latihan dari para atlet untuk mencapai performa maksimal pada saat pertandingan. Namun satu hal yang perlu diingat, tingkat akurasi dalam pengukuran pada *smartwatch* masih belum terlalu akurat. Tingkat akurasi dari *smartwatch* salah satunya tergantung dari sensor yang digunakan. Beberapa *brand/merk smartwatch* yang lebih terkenal dan harga yang lebih tinggi mungkin saja memiliki tingkat akurasi pengukuran yang lebih tinggi.

Ilmu pengukuran digunakan dalam berbagai aktifitas. Pengukuran tidak terikat waktu dan ada di semua lini kehidupan. Ilmu pengukuran semakin berkembang mengikuti kemajuan teknologi, menjadikan yang sulit menjadi mudah. Jika semua dapat terukur mungkin hidup akan lebih teratur.



Tampilan pengukuran kalori dari aktivitas harian pada *smartwatch*



Sebuah Catatan tentang Jabatan Fungsional di Era PermenPAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023

Oleh: **Adi Candra Purnama dan Permadi**
Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan

Sumber foto: freepik.com



Sumber foto: freepik.com

Pada tanggal 1 Juli 2023 mulai diberlakukan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, seluruh peraturan yang terkait dengan jabatan fungsional telah dicabut dan semua mengacu pada Permenpan RB tersebut. Namun demikian terkait dengan peraturan pelaksanaan Permenpan RB tentang Jabatan Fungsional tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Permenpan RB No.1 tahun 2023 ini.

Menurut Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bapak Haryomo Dwi Putranto, bahwa pasca ditetapkannya PermenpanRB Nomor 1 Tahun 2023 merupakan sebuah perubahan yang lebih baik bagi pejabat fungsional, bagi organisasi ketika pejabat fungsional tersebut memiliki kepastian karier dapat berkontribusi terhadap kinerja organisasi. Sehingga jabatan fungsional itu bukan sebagai *second class* atau kelas kedua, tetapi sama posisinya yaitu sama-sama berkontribusi terhadap capaian kinerja organisasi.

Selanjutnya terkait dengan PermenpanRB ini menurut Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur (ASDEP P3) Bapak Aba Subagja merupakan program Transformasi Jabatan Fungsional, hal ini dilakukan sebagai pelaksanaan mandat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana ASN itu adalah satu profesi, oleh sebab itu ASN harus diperkuat sebagai satu profesi dengan mengarahkan ASN harus bisa menguasai satu bidang tertentu. Kemudian, adanya penyederhanaan birokrasi pemerintah serta pengalihan dari mandatory Presiden supaya mengalihkan eselon III

dan eselon IV menjadi jabatan-jabatan fungsional. Selanjutnya bahwa transformasi ini harus dilakukan karena lebih dari 50% bahkan hampir 60% ASN telah menduduki jabatan fungsional. Sehingga dituntut menjadi birokrasi yang *agile* dan dinamis. Hal ini sangat tergantung dari gerak lincah pejabat fungsional tersebut.

Jadi jabatan fungsional diharapkan menjadi lebih fleksibel dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga dapat berkinerja lebih baik dan tidak terkendala dengan karirnya yang selama ini dalam memperoleh kenaikan pangkat atau jabatan yang lebih tinggi berdasarkan angka kredit yang dinilai melalui

ada tanggal 1 Juli 2023 mulai diberlakukan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, seluruh peraturan yang terkait dengan jabatan fungsional telah dicabut dan semua mengacu pada Permenpan RB tersebut. Namun demikian terkait dengan peraturan pelaksanaan Permenpan RB tentang Jabatan Fungsional tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Permenpan RB No.1 tahun 2023 ini.

Menurut Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan



Sumber foto: freepik.com

Kepegawaian Negara (BKN) Bapak Haryomo Dwi Putranto, bahwa pasca ditetapkannya PermenpanRB Nomor 1 Tahun 2023 merupakan sebuah perubahan yang lebih baik bagi pejabat fungsional, bagi organisasi ketika pejabat fungsional tersebut memiliki kepastian karier dapat berkontribusi terhadap kinerja organisasi. Sehingga jabatan fungsional itu bukan sebagai *second class* atau kelas kedua, tetapi sama posisinya yaitu sama-sama berkontribusi terhadap capaian kinerja organisasi.

Selanjutnya terkait dengan PermenpanRB ini menurut Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur (ASDEP P3) Bapak Aba Subagja merupakan program Transformasi Jabatan Fungsional, hal ini dilakukan sebagai sebagai pelaksanaan mandat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana ASN itu adalah satu profesi, oleh sebab itu ASN harus diperkuat sebagai satu profesi dengan mengarahkan ASN harus bisa

menguasai satu bidang tertentu. Kemudian, adanya penyederhanaan birokrasi pemerintah serta pengalihan dari mandatory Presiden supaya mengalihkan eselon III dan eselon IV menjadi jabatan-jabatan fungsional. Selanjutnya bahwa transformasi ini harus dilakukan karena lebih dari 50% bahkan hampir 60% ASN telah menduduki jabatan fungsional. Sehingga dituntut menjadi birokrasi yang *agile* dan dinamis. Hal ini sangat tergantung dari gerak lincah pejabat fungsional tersebut.

Jadi jabatan fungsional diharapkan menjadi lebih fleksibel dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga dapat berkinerja lebih baik dan tidak terkendala dengan karirnya yang selama ini dalam memperoleh kenaikan pangkat atau jabatan yang lebih tinggi berdasarkan angka kredit yang dinilai melalui Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) dari butir-butir kegiatan sesuai dengan jabatan fungsionalnya.

Pejabat fungsional yang berkinerja tinggi tidak perlu khawatir lagi tidak dapat menyusun DUPAK karena kesibukan tugas pekerjaannya karena dengan Permen PAN dan RB Nomor 1 tahun 2023 ini tidak lagi menyusun DUPAK untuk memperoleh Angka Kredit, karena Angka Kreditnya akan ditentukan oleh hasil kerja yang direalisasikan dalam rencana kerjanya yang telah didialogkan dengan atasannya sebagaimana rencana kinerja pimpinan yang telah diperjanjikan setiap tahunnya. Ini merupakan peluang yang terbuka untuk pengembangan karier dan berekspresinya para pejabat fungsional karena disitu ada predikat kinerja yang dikonversi menjadi Angka Kredit. Jadi individu yang berkinerja lah yang akan memperoleh Angka Kredit.

Transformasi Tata Kelola Jabatan Fungsional

Ada 4 (empat) hal yang perlu dicatat dalam transformasi tata kelola jabatan fungsional yaitu:

1. Tugas dan Ruang Lingkup Kegiatan;
2. Pola Karier Jabatan Fungsional;
3. Simplifikasi Jabatan Fungsional; dan
4. P e n g e m b a n g a n Kompetensi.

Ke empat hal ini merupakan suatu tatanan perubahan yang sangat signifikan terhadap tata kelola jabatan fungsional, oleh karena cakupan dalam keempat hal tersebut merupakan sebuah tuntutan kebutuhan.

Pertama dalam hal tugas dan ruang lingkup kegiatan diarahkan pada simplifikasi ruang lingkup tugas jabatan fungsional berbasis ekspektasi kinerja. Kedua, terkait dengan pola karier jabatan fungsional ditujukan untuk pengembangan karier jabatan fungsional pada *talent mobility* dalam pola karier horizontal, vertical dan diagonal. Ketiga, simplifikasi jabatan fungsional terarah pada penyederhanaan jumlah jabatan fungsional berbasis pada rumpun / klasifikasi jabatan fungsional / urusan bidang pemerintahan. Ke empat, pengembangan kompetensi untuk mendukung pada pemenuhan kompetensi minimal jabatan fungsional.

Inilah inti dari pada transformasi dan tata kelola jabatan fungsional yang telah ditetapkan dalam Permen PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Permen PAN dan RB ini merupakan perubahan yang sangat signifikan dari Permen PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai

Negeri Sipil. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan Permen PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023 ini adalah Peraturan Teknis sebagai pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN yang sedang dinantikan oleh semua pihak, baik dalam lingkup Kementerian / Lembaga maupun lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota.

Perubahan Pokok Tata Kelola Jabatan Fungsional

Perubahan adalah konsep suatu hal yang diharapkan akan menjadi lebih baik, begitu pula perubahan dalam tata kelola jabatan fungsional. Perubahan pokok dalam tata kelola jabatan fungsional dapat kita lihat antara Permenpan Rb nomor 13 tahun 2019 dengan Permenpanrb nomor 1 tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

PERMENPAN DAN RB 13/2019	PERMENPAN DAN RB 1 / 2023
Berbasis penyesuaian antara butir kegiatan dan SKP;	Berbasis ruang lingkup tugas pada setiap jenjang jabatan dan disesuaikan dengan ekspektasi kinerja;
Perpindahan dilakukan dalam satu rumpun;	Perpindahan dapat dilaksanakan lintas rumpun untuk memudahkan <i>talent mobility</i>
Penetapan target Angka Kredit di awal tahun kinerja berbasis pada penyesuaian butir kegiatan dalam SKP;	Target Angka Kredit Tahunan ditetapkan sebagai koefisien pengali untuk konversi predikat evaluasi kinerja setiap tahun;
Berbasis pada penilaian Angka Kredit (AK) per butir kegiatan dan pengajuan DUPAK ;	Tidak ada lagi DUPAK, evaluasi berdasarkan hasil penilaian pemenuhan ekspektasi kinerja;
Kenaikan Pangkat Luar Biasa hanya untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan Jabatan Administrasi (JA);	Ditambahkan ketentuan kenaikan pangkat istimewa diberikan bagi pejabat fungsional yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas Jabatan Fungsional;
Instansi Pembina memiliki 19 tugas yang utamanya yaitu : Pendidikan dan Pelatihan, Formasi, Standar Kompetensi, Uji Kompetensi dan Koordinasi.	Instansi Pembina Menyusun konten pembelajaran, strategi, dan program pengembangan kompetensi.

Inilah sebuah catatan, secara garis besar yang dapat memberikan gambaran kepada semua pemangku kepentingan dalam jabatan fungsional.

Penetapan Predikat Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sebuah catatan yang dikutip dari Website Kementerian PAN dan RB bahwa penetapan predikat kinerja aparatur sipil negara (ASN) kini dilakukan dengan memperhatikan pola distribusi predikat kinerja berdasarkan capaian kinerja organisasi tempatnya bekerja. Penegasan mengenai penilaian itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 03/2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai ASN. "Evaluasi kinerja Pegawai ASN dilakukan dengan menetapkan predikat kinerja Pegawai ASN berdasarkan predikat capaian kinerja organisasi," tulis SE yang telah disosialisasikan melalui kanal YouTube resmi Kementerian PANRB dalam program Bisa Tanya Kebijakan PANRB: "Sosialisasi Surat Edaran Menteri PANRB No. 03 Tahun 2023", Selasa (07/02).

Ada tiga tahap untuk mengevaluasi kinerja pegawai. Pertama adalah menetapkan capaian kinerja organisasi yang terdiri atas penetapan capaian kinerja periodik dan tahunan. Capaian kinerja organisasi ditetapkan dalam predikat Istimewa, Baik, Butuh Perbaikan, Kurang, dan Sangat Kurang. Capaian kinerja organisasi periodik ditetapkan berdasarkan capaian rencana aksi dan target periodik.

Predikat istimewa diberikan apabila rencana aksi yang dicapai oleh satuan organisasi melampaui target yang disepakati bersama pimpinan. Sedangkan yang paling rendah, yakni predikat Sangat Kurang, diberikan apabila sebagian besar rencana aksi belum menunjukkan progres. Sementara capaian kinerja tahunan pada satuan organisasi ditetapkan berdasarkan rating kinerja, yang terdiri dari komponen capaian perjanjian kinerja dan ekspektasi kinerja satuan organisasi. Capaian kinerja organisasi ditetapkan oleh pimpinan organisasi di atasnya, dan dapat mempertimbangkan rekomendasi dari satuan organisasi yang membidangi perencanaan kinerja organisasi, kepegawaian, dan/atau pengawasan.

Tahap kedua adalah menetapkan pola distribusi predikat kinerja pegawai berdasarkan capaian kinerja organisasi. Capaian kinerja organisasi akan menentukan pola distribusi kinerja pegawai yang digunakan sebagai pertimbangan bagi pimpinan dalam menentukan predikat kinerja pegawai dibawahnya. Selanjutnya, tahap ketiga yakni menetapkan predikat kinerja pegawai dengan mempertimbangkan kontribusi pegawai terhadap kinerja organisasi.

Pejabat penilai kinerja menetapkan rating hasil kerja dan perilaku pegawai ke dalam predikat kinerja berdasarkan capaian organisasi. Bila pegawai yang dievaluasi adalah pimpinan organisasi, maka capaian kinerja satuan organisasi yang dipimpin ditetapkan sebagai rating hasil kerja pegawai yang bersangkutan. Predikat kinerja organisasi dan distribusi predikat kinerja pegawai ditetapkan dalam Format Penetapan Predikat Kinerja yang ditandatangani oleh pimpinan yang berwenang. Sebagai alat bantu perhitungan pola distribusi, dapat dipergunakan kalkulator distribusi predikat kinerja yang bisa diunduh melalui tautan <https://bit.ly/PredikatKinerja>.

“Kalkulator distribusi predikat kinerja pegawai beserta format penetapan predikat kinerja yang telah diisi oleh instansi pemerintah disampaikan kepada Menteri PANRB sebagai bahan evaluasi kebijakan dan Kepala BKN untuk membantu proses verifikasi administrasi pelayanan kepegawaian,” jelas surat yang

ditandatangani Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas pada 31 Januari 2023 lalu.

Maksud dari penyusunan Surat Edaran ini adalah untuk memberikan kejelasan dan kepastian serta melengkapi pengaturan mengenai evaluasi kinerja pegawai dengan tujuan menyediakan kebijakan yang bersifat transisi sebelum ditetapkannya ketentuan yang mengatur kinerja organisasi.

Untuk penjelasan lebih rinci dan mengunduh Surat Edaran Menteri PANRB No. 03/2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai ASN, dapat klik tautan berikut:

<https://jdih.menpan.go.id/puu-1629-Surat%20Edaran%20Menpan.html>

Penutup

Dari berbagai catatan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pejabat Fungsional di masa mendatang memiliki peluang karir yang sangat terbuka lebar, baik dalam posisi vertikal, horizontal maupun diagonal. Sehingga jabatan fungsional ini akan menjadi suatu jabatan idaman bagi ASN di seluruh Republik Indonesia.

Di era Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 adalah era fleksibilitas bagi jabatan fungsional karena semua jalur dapat ditempuh tidak ada kebutuhan dalam tatanan kariernya. Sehingga pejabat fungsional ini diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya secara signifikan. Sebab tidak ada lagi yang menghambat langkah kariernya bila yang bersangkutan terus berkinerja tinggi sebagaimana ekspektasi dari pimpinan dan organisasinya. ***

Sumber Catatan

1. Wawancara dengan Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian (Deputi PMK) Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bapak Drs. Haryomo Dwi Putranto, M.Hum.;
2. Wawancara dengan Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur (ASDEP P3), Bapak Aba Subagja, S.Sos., M.A.P.;
3. Panduan Memahami Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Menjawab Tanya Jabatan Fungsional)
4. Website JDIH.Menpan.go.id

Sumber foto: freepik.com

Peran Perpustakaan dalam peningkatan wawasan dan Pengetahuan Semua Pejabat Fungsional

Oleh: **Mega Indraswari**
Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan

Meningkatkan wawasan, keilmuan dan pengetahuan adalah sebuah upaya dalam rangka membangun bangsa dan negara menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Upaya meningkatkan wawasan, keilmuan dan pengetahuan bukanlah semata-mata tanggung jawab ranah pendidikan, tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak. Namun demikian, bila kita berbicara tentang peningkatan wawasan, keilmuan dan pengetahuan tidak bisa lepas dari dunia pendidikan, pelatihan maupun pembinaan. Hal ini mencerminkan bahwa betapa pentingnya pendidikan, pelatihan dan pembinaan baik dalam lingkup kelembagaan maupun dalam lingkup keluarga.

Di dalam lingkup kelembagaan terkait dengan pendidikan, pelatihan dan pembinaan terdapat sarana yang amat penting perannya yaitu Perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu instrumen dalam mencerdaskan dan mengembangkan wawasan setiap individu. Oleh karena dunia perbukuan baik secara cetak maupun buku elektronik yang terhimpun di perpustakaan adalah sumber pembelajar. Sebagai wahana sumber belajar, maka perpustakaan perlu diperhatikan dari berbagai aspek antara lain yaitu aspek kemudahan dalam mengakses, aspek kenyamanan dalam peminjaman dan aspek keterkinian dalam penyediaan buku yang dibutuhkan oleh para pembaca atau penikmat buku.

Oleh karena itu perlu menggalakan kebiasaan membaca buku baik buku cetak maupun buku elektronik bagi para pejabat fungsional, khususnya pejabat fungsional di bidang perdagangan. Hal ini penting karena kebiasaan membaca buku, khususnya buku-buku yang terkait dengan tugas dan fungsi pejabat fungsional sangat membantu bagi pejabat fungsional tersebut dalam melaksanakan pekerjaannya.

sumber: freepik.com



Betapa pentingnya fungsi perpustakaan dalam meningkatkan wawasan, keilmuan dan pengetahuan bagi para pejabat fungsional, sehingga keberadaan perpustakaan ini perlu diperhitungkan baik dilingkup Instansi Pusat, maupun Di Daerah atau bahkan di Pedesaan sekalipun.

sumber: freepik.com

Perpustakaan di masa lalu

Jika kita berbicara perpustakaan, maka dapat kita ketahui bahwa kata Perpustakaan berasal dari kata dasar Pustaka yang artinya kitab atau buku. Merujuk pada Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional RI memberikan batasan pengertian perpustakaan yaitu bahwa perpustakaan merupakan salah satu sarana pelestari bahan pustaka sebagai hasil budaya dan mempunyai fungsi sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan dalam rangka mencerdaskan pembangunan nasional.

Perpustakaan pada masa lalu dapat diidentikan dengan kumpulan atau tumpukan buku-buku yang ditata dan dipajang dalam satu ruangan dengan jenis dan rumpun dalam keilmuan tertentu. Para pelanggan perpustakaan hadir secara fisik langsung memilih buku-buku dalam katalog atau langsung melihat buku-buku yang dipajang kemudian memilihnya untuk dibaca ditempat baca yang telah disediakan. Kemudian yang bersangkutan mencatat

hal yang dibutuhkan sebagai sumber referensi dari buku-buku yang telah dibaca tersebut.

Disamping dengan cara membaca langsung di perpustakaan tersebut, pelanggan perpustakaan biasanya meminjam buku yang hendak dibacanya secara keseluruhan dan buku tersebut dibawa kerumah dalam peminjaman beberapa hari kedepan. Di masa lalu hal ini sudah sangat lazim dilakukan, sehingga disediakan buku khusus untuk peminjaman buku bagi para pelanggan dengan mematuhi tata tertib dan sanksi bila terjadi pelanggaran terhadap tata tertib peminjaman buku tersebut.

Perpustakaan di masa lalu sangat memerlukan ruangan yang besar, luas, bersih dan nyaman dengan sirkulasi udara yang baik. Kenyamanan ruangan perpustakaan ini mutlak diperlukan karena untuk menjamin para pelanggan perpustakaan tetap sehat dan segar bugar setelah berjam-jam menikmati buku yang dibacanya.

Demikian sekilas, bila kita menengok kondisi perpustakaan dimasa lalu, dimana kesan yang menempel adalah tempatnya para "kutu buku" berkumpul dan bercengkrama dengan buku-buku yang dipilihnya.

Perpustakaan di masa kini

Menurut Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pustakawan, Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi

kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Nah, betapa komprehensipnya ruang lingkup perpustakaan di masa kini.

Dewasa ini memang tidak dapat di sangkal lagi bahwa perpustakaan dipandang sebagai institusi atau unit kerja di instansi yang dapat melayani kebutuhan masyarakat akan informasi dalam bidang pendidikan, pelatihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya. Jika kita menyimak perkembangan perpustakaan di masa kini, terdapat dua jenis perpustakaan yaitu perpustakaan konvensional dan perpustakaan digital.

Perpustakaan konvensional adalah perpustakaan yang memiliki ruangan dan buku-buku serta sarana dan prasarana penunjang lainnya secara fisik nyata dan untuk mengaksesnya harus berkunjung ke lokasi perpustakaan tersebut, sedangkan perpustakaan digital adalah perpustakaan yang tidak menggunakan ruangan atau tempat secara fisik, perpustakaan digital berada dalam sebuah portal atau aplikasi yang berada dalam dunia maya para pelanggan perpustakaan tersebut dapat mengakses melalui tata cara dan aturan yang telah ditetapkan oleh pengelola sehingga para pelanggan dapat mengakses perpustakaan digital ini kapan saja dan dimana saja sebagaimana tata tertib yang ditetapkan oleh perpustakaan digital tersebut.

Terkait dengan tata kelola perpustakaan di Indonesia mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional kecuali perpustakaan pribadi yang hanya diperuntukan untuk keperluan atau kepentingan pribadi.

Jadi Perpustakaan di masa kini sangat komprehensif peran dan ruang lingkungannya, karena dengan pesatnya pertumbuhan perpustakaan digital maka para pelanggan dapat mengakses kebutuhannya selama 24 jam, sehingga bagi para pelanggan tidak lagi harus menunggu esok hari di bukanya perpustakaan. Kemudian pustakawan pun dapat memonitor pelanggannya dimana saja dan kapan saja dengan menggunakan jaringan internet.

Di masa kini perpustakaan dapat juga menjadi wahana diskusi dan berbagi pengetahuan melalui aplikasi grup perpustakaan yang disediakan oleh pengelola perpustakaan tersebut, Sehingga peran perpustakaan di masa kini bagi semua pejabat fungsional yang ada di tanah air, tidak hanya sebagai sarana mencari referensi tetapi juga sebagai sarana mencari informasi dan berdiskusi dalam memperoleh solusi suatu problematika baik dalam ranah keilmuan maupun penerapan dalam langkah praktis guna peningkatan kinerja.



Transformasi perpustakaan

Perpustakaan merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam rangka meningkatkan wawasan bagi seluruh pejabat fungsional yang ada umumnya dan khususnya bagi seluruh pejabat fungsional bidang perdagangan dibawah pembinaan Kementerian Perdagangan. Dalam hal ini sudah barang tentu keterlibatan pendidikan, pelatihan dan pembinaan pejabat fungsional tidak dapat dipisahkan. Peran Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan dengan Perpustakaan sangat besar dalam mewujudkan peningkatan wawasan, keilmuan dan pengetahuan bagi Pejabat Fungsional. Melalui pemanfaatan perpustakaan selain memperoleh informasi yang dibutuhkan juga dapat merubah kecerdasan dalam bekerja dengan merubah dari kinerja rendah menjadi kinerja tinggi.

Perubahan atau Transformasi perpustakaan sebagai sarana meningkatkan wawasan, keilmuan dan pengetahuan bagi pejabat fungsional dapat diwujudkan dengan menempatkan peran penting Perpustakaan bagi kebutuhan pejabat fungsional antara lain yaitu :

1. Menjadikan Perpustakaan sebagai media koneksitas antara ilmu pengetahuan dan sumber informasi dengan para pejabat fungsional;
2. Mendorong Perpustakaan sebagai institusi atau unit kerja instansi dalam mengembangkan minat baca sekaligus budaya membaca bagi seluruh pegawai khususnya pejabat fungsional;
3. Menjadikan Perpustakaan sebagai wahana pembelajaran bagi seluruh pegawai khususnya pejabat fungsional;
4. Menjadikan Perpustakaan sebagai wahana penyedia informasi dan ilmu pengetahuan terkini yang mendukung peningkatan wawasan, keilmuan dan pengetahuan bagi semua pegawai dan khususnya pejabat fungsional; dan
5. Menjadikan Perpustakaan sebagai sarana yang dapat memotivasi dan memfasilitasi bagi semua pegawai khususnya pejabat fungsional dalam mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

Nah, melalui transformasi atau perubahan peran perpustakaan ini diharapkan dapat menjembatani dan mendorong peningkatan wawasan, keilmuan dan pengetahuan bagi pejabat fungsional.

Penutup

Menyimak betapa pentingnya peranan perpustakaan dalam meningkatkan wawasan, keilmuan dan pengetahuan bagi pejabat fungsional, maka pembinaan dan pengembangan perpustakaan dengan menyelaraskan kemajuan teknologi yang kian pesat harus terus diupayakan untuk pengembangan budaya pejabat fungsional dalam minat baca dan pembelajaran. Disamping itu pengembangan dan sosialisasi perpustakaan harus terus digalakan sehingga perpustakaan merupakan sebuah kebutuhan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan wawasan, keilmuan dan pengetahuan.

Perpustakaan perlu melakukan transformasi peran dalam meningkatkan wawasan, keilmuan dan pengetahuan bagi semua pegawai khususnya pejabat fungsional. Transformasi kearah yang lebih menggairahkan kepada semua pihak dalam memanfaatkan perpustakaan. Kondisi atau suasana perpustakaan baik secara fisik maupun dalam dunia maya tidak menjenuhkan. Menjadikan perpustakaan sebagai wahana inovatif, kreatif dan edukatif serta menjadikan perpustakaan sebagai bagian kebutuhan pokok penting bagi semua pihak.***



sumber: freepik.com

Potensi BRICS dalam Pelemahan Dolar Amerika Serikat

Oleh: Andhi, Analis Perdagangan
Badan Kebijakan Perdagangan/Kementerian Perdagangan



sumber: freepik.com

Pada beberapa minggu terakhir kita disajikan penurunan dominasi Dolar Amerika Serikat (AS) sebagai denominasi utama cadangan devisa internasional. Hal tersebut terlihat dari pelemahan Dolar AS terhadap Rupiah saat ini. Menurut data Stephen Jen dan Joana Freira dari Eurizon SLJ Capital pemakaian dollar AS sebagai alat cadangan devisa internasional turun 10 kali lipat lebih cepat pada tahun 2022 dibandingkan penurunan selama periode 2002 sampai dengan 2021. Pada tahun 2021 penggunaan dollar AS sebagai cadangan devisa global turun menjadi 55% dimana pada tahun 2001 sebesar 73%. Pada tahun 2022 penggunaan dolar AS sebagai devisa global turun lagi menjadi 47%.

Adanya penurunan dollar AS dalam penggunaan cadangan devisa salah satu penyebabnya adalah invasi Rusia ke Ukraina pada awal tahun 2022. Negara-negara Barat menerapkan sanksi ekonomi kepada Rusia dengan melakukan blokir SWIFT (*Society for Worldwide International Financial Telecommunications*). Akibat hal tersebut membuat negara-negara berkembang yang disebut Global South mencari alternatif selain dollar AS sebagai cadangan devisa. Negara-negara berkembang mulai berpikir dollar AS atau SWIFT yang mayoritas menggunakan dollar AS akan menjadi alat politik untuk menekan banyak negara lewat pemblokiran transaksi.

Salah satu kelompok negara yang ingin mengurangi pemakaian dollar AS (depolarisasi) adalah BRICS. BRICS adalah akronim dari negara Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang awalnya adalah BRIC pada tahun 2001, akronim tersebut diciptakan oleh Jim O'Neill (ekonom Goldman Sachs) untuk Brasil, Rusia, India, dan China. Kemudian pada tahun 2010, Afrika Selatan ditambahkan menjadi BRICS. Goldman Sachs mengklaim bahwa ekonomi global akan didominasi oleh empat ekonomi BRIC pada tahun 2050. Alasan utama untuk

klaim tersebut adalah bahwa China, India, Brasil, Rusia, dan Afrika Selatan menempati peringkat di antara ekonomi pasar dengan pertumbuhan dan pertumbuhan tercepat di dunia. Keunggulan komparatif utama kelompok negara BRICS ini adalah mereka mempunyai tenaga kerja dengan upah yang rendah, demografi yang menguntungkan, dan sumber daya alam yang melimpah.

Potensi yang dimiliki oleh BRICS secara gabungan, sejak berfungsi pada 2009, BRICS mencakup 43 persen penduduk dunia, 17 persen perdagangan dunia, memiliki produk domestik bruto (PDB) 24,44 triliun dollar AS pada 2021, atau melebihi AS dan seperempat PDB dunia (Statista, 28/6/2021).

Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva belum lama ini ini mengatakan tentang rencana mata uang yang digunakan bersama di BRICS untuk mengurangi ketergantungan terhadap dollar AS. Apabila mata uang BRICS terwujud maka akan berpotensi mengganggu dominasi dollar AS dalam perdagangan melemahkan dollar AS sebagai mata uang cadangan. Berdasarkan keterangan Wakil Ketua Duma Negara Rusia Babakov di India Times, BRICS akan menggunakan mata uang baru dengan komoditas lain, seperti emas dan logam tanah jarang (LTJ). Perkembangan upaya menciptakan mata uang baru tersebut, rencananya akan dipresentasikan pada KTT BRICS di Afrika Selatan pada Agustus 2023.

Menurut Kepala Ekonom BCA David Sumual (CNBC.com) rencana penggunaan mata uang BRICS memiliki kelemahan karena negara-negara didalamnya harus melakukan penyatuan atau integrasi kebijakan moneter, mereka juga harus melakukan integrasi kebijakan fiskal. Dengan penyatuan mata uang, suku bunga jadi seragam namun di sisi lain kebijakan fiskal dari masing-masing negara berbeda. Hal tersebut akan memicu krisis yang pernah terjadi di Eropa dimana beberapa negara yang mempunyai ekonomi lemah akan meminjam secara agresif ke negara yang lebih kuat karena biasanya suku Bunga di negara kuat akan lebih rendah. Apabila terjadi krisis seperti 2008 negara-negara lemah yang meminjam dana yang besar akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan pinjaman.

Oleh karena itu, menurut David sebaiknya untuk BRICS atau negara lainnya yang ingin mengurangi ketergantungan akan dolar, bisa menggunakan instrumen transaksi mata uang lokal, biasa disebut sebagai local currency settlement (LCS) atau local currency transaction (LCT). Sebab, jika pengurangan dolar AS dengan membentuk mata uang baru, masing-masing negara bukan hanya harus mensinergikan kebijakan moneter, tapi juga kebijakan fiskal.

Di internal BRICS menurut Sirajudin Hasbi (<https://mapcorner.wg.ugm.ac.id>, 2017) sendiri masih perlu ada penyamaan visi dan misi karena hubungan berdasarkan pragmatisme ini memiliki potensi yang besar untuk terpecah. Apalagi diperkirakan kalau BRICS Bank sebagai sarana untuk memperoleh kepentingan / keuntungan yang lebih besar bagi negara BRICS yang memiliki potensi besar. Bisa saja berkat adanya BRICS ini Cina bisa tumbuh besar tetapi Afrika Selatan tak terlalu memiliki manfaat.

Sustainability BRICS juga akan diuji persoalan politik masing – masing negara. Selain karena perbedaan ideologi antar negara juga karena Cina dan Rusia merupakan negara yang memiliki potensi instabilitas politik yang sangat tinggi. India yang mengalami kesenjangan ekonomi tinggi juga terancam pergerakan sosial sewaktu – waktu yang bisa mengguncang kestabilan politik nasional. Hal seperti yang dipaparkan inilah yang bisa menjadi tantangan bagi BRICS Bank, jika bisa menghadapinya jelas akan membuat BRICS semakin

menancapkan hegemoninya dalam percaturan politik internasional.

Pada 2021, nilai produk domestik bruto (PDB) China mencapai 18 triliun dollar AS. Adapun PDB India berkisar 3,1 triliun dollar AS. Setelah pandemi Covid-19, pertumbuhan di Brasil, Afzel dan Rusia mengalami kemacetan. Gunther Maihold, analis keamanan di Jerman, menilai aliansi BRICS belum bisa dianggap sebagai pesaing Barat, melainkan forum bagi menguatnya kedaulatan dan otonomi di belahan Bumi selatan. Dalam dunia bipolar antara China dan Rusia melawan AS dan Eropa, negara-negara seperti Afrika Selatan, India atau Brasil hanya ingin mengupayakan kondisi yang lebih baik.

Indonesia memang merupakan kandidat yang paling potensial untuk diundang ke dalam BRICS, sebagai emerging market dan negara Muslim terbesar, dan hal ini diakui oleh China. Kekuatan BRICS terletak pada keberagaman dan keterwakilannya sehingga negara anggotanya berharap dapat memperdalam kerja sama dengan pasar negara berkembang dan negara lainnya, dan meningkatkan daya tarik BRICS (Global Times, 21/5/2022). Untuk itu, jelas dibutuhkan tawar-menawar, negosiasi, dan kompromi untuk mencegah adanya dominasi. Artinya, kalau Indonesia lengah, bukan hanya akan tersisih, tetapi bukan tidak mungkin justru negara-negara tetangga kita yang akan "menyalip di tikungan" (Wirengjurit, 2022).

Pelaku Usaha IKM/UKM di Kabupaten Gianyar dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan melalui Ekspor dan Impor

Oleh: Ida Bagus Ketut Wahyunada
Pengawas Perdagangan, Disperindag Kab. Gianyar

sumber: freepik.com

Perdagangan internasional atau disebut juga dengan *International Trade* merupakan aktivitas ekonomi perdagangan yang melibatkan negara-negara lain hingga perusahaan multinasional yang terdiri dari kegiatan ekspor dan impor, dimana perdagangan internasional ini diperlukan oleh setiap negara untuk memenuhi kebutuhannya di bidang ekonomi masing-masing.

Kebijakan Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional sendiri memiliki beberapa manfaat serta dampak terhadap perekonomian suatu negara maupun sosial dan politik.

Bentuk Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional memiliki bentuk antara lain :

- Perdagangan Internasional Bilateral
- Perdagangan Internasional Regional
- Perdagangan Internasional Multilateral

Faktor-faktor Pendorong Perdagangan Internasional

Faktor perbedaan keadaan alam

Keadaan alam suatu negara dengan negara lainnya tentu sangat berbeda, hal ini dipengaruhi oleh letak geografis suatu negara. Hal ini juga mempengaruhi

sumber daya manusia di dalamnya, ketersediaan SDM maupun SDA inilah yang membuat negara-negara memberlakukan sistem perdagangan internasional.

Faktor Ketertarikan dan kebutuhan

Perdagangan internasional sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang didapatkan melalui aktivitas impor atau ekspor. Apabila suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhan negaranya, dalam hal ini kebutuhan akan sebuah produk tidak dapat terpenuhi, maka negara tersebut dapat mengimpor produk yang diinginkan pada negara lain. Hal lain yang juga menjadi faktor pendorong perdagangan internasional adalah kebutuhan untuk memperluas target pasar. Sebagai seorang produsen melakukan perluasan target usaha dapat menjadi salah satu cara alternatif apabila terjadi penumpukan barang produksi didalam negeri.

Manfaat Serta Dampak Perdagangan Internasional

Kebijakan dari perdagangan internasional ini juga dapat memberikan manfaat bagi negara negara yang menerapkannya. Salah satu manfaat perdagangan

internasional adalah berperan penting pada pertumbuhan PDB suatu negara. Selain itu, dengan perdagangan internasional, ini akan membuka kesempatan bagi suatu negara untuk dapat memanfaatkan sumber daya negara lain dengan efektif.

Perdagangan internasional dapat memberikan dampak serta manfaat secara global dengan :

1. Membangun kerjasama antar negara

Perdagangan Internasional memiliki dampak positif yang bermanfaat yaitu salah satunya dengan membentuk hubungan atau menjalin relasi kerjasama antara negara satu dengan negara lainnya. Melalui hubungan perdagangan internasional Bilateral, Regional dan Multilateral.

2. Efisiensi produksi dan spesialisasi kerja

Perdagangan internasional berdampak pada spesialisasi kerja masyarakat suatu negara dan sangat bermanfaat karena menjadikan negara memiliki spesialisasi dalam salah satu sektor ekonomi. Artinya negara maupun masyarakat akan memiliki keahlian atau kemampuan khusus yang lebih menjurus dan berbeda dengan negara-negara lain dalam menghasilkan suatu produk atau jasa.

3. Penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi

Dampak Positif perdagangan internasional yaitu sebagai alat mobilitas IPTEK dari negara-negara maju ke negara berkembang. Adanya kebijakan perdagangan internasional ini memungkinkan suatu negara dapat menjual/ekspor barang berbasis teknologi seperti mesin atau alat modern ke negara yang masih memiliki keterbatasan pengetahuan akan teknologi tersebut.

Selain memiliki dampak positif, perdagangan internasional tentunya memiliki dampak negatif seperti:

a. Menurunnya produksi sebuah negara

menurunnya produksi suatu negara ini dipengaruhi adanya persaingan industri negara yang satu dengan negara lainnya. Terutama produk luar negeri memiliki harga cenderung mahal dan lebih terkenal branding/nama dibandingkan dengan produk dalam negeri. Sehingga masyarakat akan lebih tergiur untuk membeli produk luar negeri karena memiliki branding yang sudah terkenal dan menyebabkan produk dalam negeri tidak dilirik sehingga berpengaruh pada menurunnya tingkat produksi barang negeri itu sendiri.

b. Persaingan Perdagangan Internasional menyebabkan UMKM tertinggal

Dampak negatif perdagangan internasional menyebabkan UMKM kesulitan untuk dapat bersaing di pasar. Selain itu, modal yang terbatas juga seringkali menjadi masalah utama bagi para pemilik industri

kecil. Dengan adanya aktivitas perdagangan internasional akan berpotensi memperkecil peluang berkembang industri kecil.

c. Ketergantungan terhadap negara lain

Dari sisi pemenuhan kebutuhan, negara berkembang biasanya memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi pada negara-negara produsen atau negara dengan teknologi industri maju. Seperti yang diketahui, produksi barang elektronik dan otomotif sampai sekarang masih dikuasai oleh negara-negara maju, dan negara berkembang selalu menjadi konsumen saja.

Hambatan Perdagangan Internasional

Daya saing produksi guna menjaga mutu kualitas dan kuantitas yang transparan dan akuntabel, dengan berdaya saing dalam usaha ekspor impor.

a. Kebijakan Pemerintah sekalipun memberikan dukungan kebebasan untuk melakukan ekspor impor, akan tetapi lebih mengutamakan produk IKM/KM guna membantu ekonomi kerakyatan di dalam berdaya saing dalam pemasaran internasional dengan menjaga kualitas dan kuantitas hasil produksi.

b. Kurangnya promosi produksi bagi UKM/IMK dalam memasarkan hasil produksinya ke pasar internasional, guna berdaya saing secara Transparan, Akuntabel dan Profesional.

c. Terdapat bermacam bentuk usaha yang dapat menghambat arus masuk barang ke dalam Negeri tetapi sifatnya bukan dalam bentuk pungutan misalnya adanya penerapan kuota, penentuan standar produk, kebijakan pelanggaran, sampai dengan aturan tetap tentang masalah kesehatan serta berbagai isu yang berhubungan dengan lingkungan.

d. Pembatasan jumlah kuantitas ini dilakukan dengan membatasi jumlah barang atau kuota yang diizinkan untuk diimpor dalam satu periode waktu tertentu.

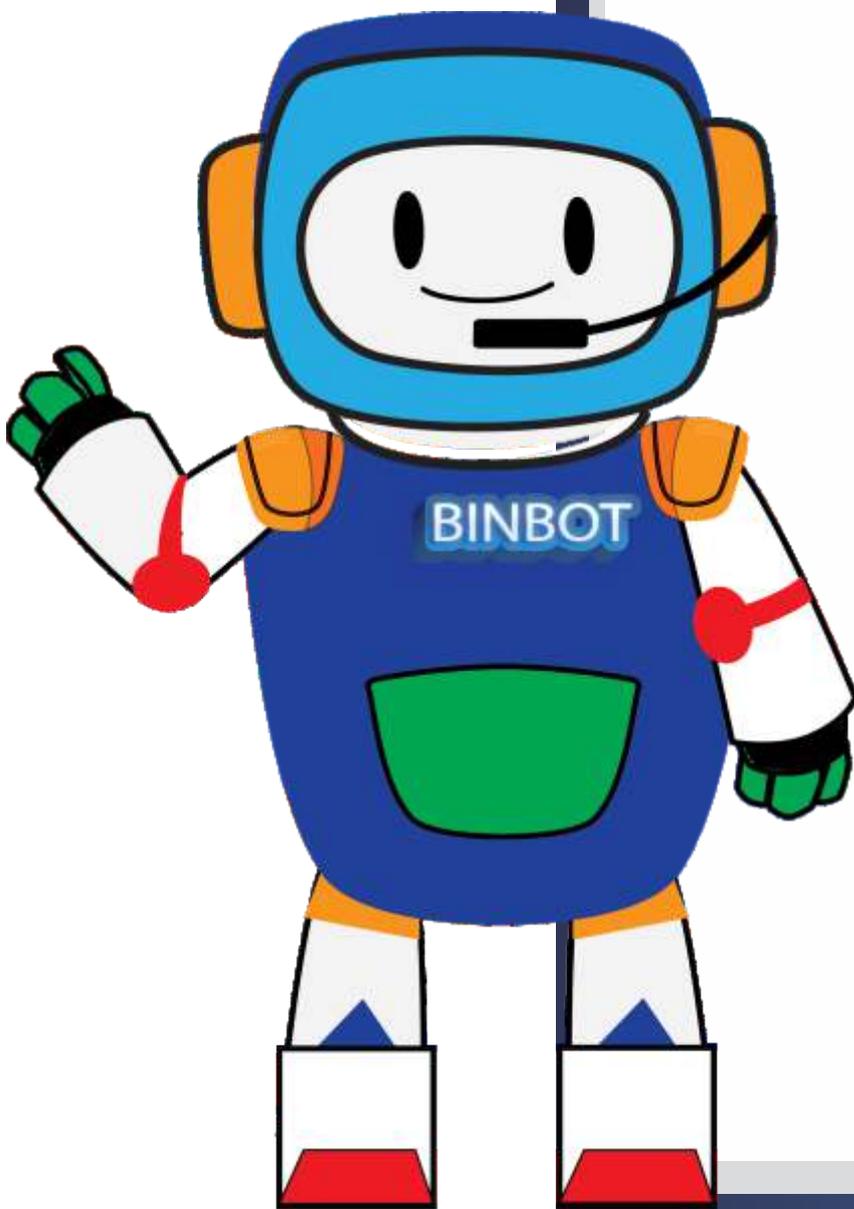
e. Pelayanan SKA pada IPSKA Kabupaten Gianyar melakukan ekspor ke beberapa Negara yang memiliki sifat kerjasama atau hubungan Bilateral, Regional serta Multilateral ke beberapa Negara ASIA, Eropa, Jepang, dan sebagainya. Yang mana merupakan salah satu sektor pemasukan devisa Negara.

Terjadinya perdagangan internasional dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keinginan suatu negara untuk memenuhi segala kebutuhan dalam negeri, keinginan suatu negara untuk mendapatkan penghasilan pendapatan yang berlebih, dan kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam mengelola sumber daya ekonomi yang berbeda oleh masing-masing negara.

Mengenal Binbot

Oleh: Mega Indraswari

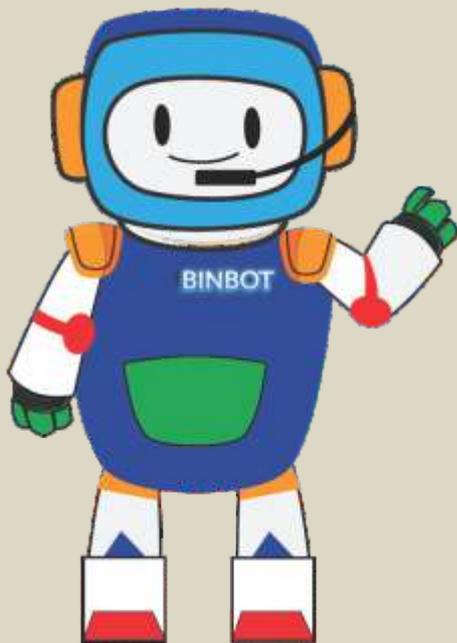
BINBOT



BINBOT adalah maskot Pusbin JF Perdagangan yang memiliki filosofi robot sederhana yang profesional, solutif dan berani membawa perubahan yang lebih baik untuk mewujudkan “SDM Fungsional Perdagangan unggul”



Kontak Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan



+6282118687772
(hanya pesan)



pusbinjfdag



Pusbin JF Perdagangan

Layanan konsultasi



Silakan *scan* QR-code atau ke laman :
[https://www.kemendag.go.id/s/
LayananSelamiJFP](https://www.kemendag.go.id/s/LayananSelamiJFP)

ISSN 2964-2124



9

772964

212003